

LAPORAN
PENELITIAN KOLABORASI PERGURUAN TINGGI
PEMETAAN DISTRIBUSI KEMISKINAN DAN PROFIL KELUARGA
MISKIN AKIBAT BENCANA KEBAKARAN LAHAN



Disusun Oleh:
Tri Kurniawati Retnaningsih
Heffi Rahayu

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
2023

PEMETAAN DISTRIBUSI KEMISKINAN DAN PROFIL KELUARGA MISKIN AKIBAT BENCANA KEBAKARAN LAHAN

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah kompleks dan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia mengimplementasikan 17 tujuan SDGs yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang yang di turunkan sampai tingkat kabupaten/kota. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan direspon oleh Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2004 yang sekaligus merespon Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi triple-track problem, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun secara relatif tetapi secara nominal meningkat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil dari variabel yang diteliti dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram.

Kata kunci: Pemetaan, Keluarga Miskin Bencana, Kebakaran, lahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah kompleks dan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya. negara berkembang di Sebagian wilayah Asia dan Afrika, menjadikan kemiskinan sebagai agenda pengentasan atau pengurangan. Sedangkan di negara maju, tertarik mengangkat isu kemiskinan karena kondisi tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik mereka (Hermawati, 2011). Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia di dalamnya, menyepakati Agenda for Sustainable Development tahun 2030. Resolusi ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan diseluruh dunia melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Selain itu, tujuan program ini juga untuk mengurangi kelaparan, perbaikan pendidikan, pemberdayaan perempuan, meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Seluruh agenda tersebut dijabarkan secara praktis dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia mengimplementasikan 17 tujuan SDGs yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang yang di turunkan sampai tingkat kabupaten/kota. Sejalan dengan tujuan pengentasan kemiskinan, dalam amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945

pasal 28A dan 28H disebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman serta nyaman. Dukungan tersebut diturunkan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan diantaranya yaitu, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan beberapa langkah yang disebutkan dalam pasal 3 seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan direspon oleh Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2004 yang sekaligus merespon Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Terdapat 6 program pokok penanggulangan kemiskinan yaitu (1) Program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE), (2) Program pengembangan Lembaga keuangan mikro, (3) Program rehabilitasi sosial daerah kumuh, (4) Program santunan hidup dan jaminan kesejahteraan social keluarga miskin, (5) Program pengembangan kemitraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan, dan (6) Program terpadu penanganan desa miskin. Peraturan tersebut diperbaharui melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut bertujuan untuk merespon permasalahan kemiskinan sampai

tingkat rumah tangga dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi.

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun secara relatif tetapi secara nominal meningkat. Kedua, kerentanan kemiskinan yang mengarah pada banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan antar wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kesenjangan pendapatan atau konsumsi antar penduduk secara keseluruhan serta antar penduduk miskin atau dapat disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan (Azharuddin *et al*, 2020). Suryawati (2004) dalam bukunya menyebutkan bahwa kemiskinan terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, dan kemiskinan kultur. Apabila memperhitungkan bentuk-bentuk kemiskinan tersebut, maka hampir separuh rakyat Indonesia dapat dianggap telah mengalami paling sedikit satu bentuk kemiskinan.

Penelitian tentang kemiskinan telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik tersebut yaitu Arrafiqur Rahman *et al* (2020) meneliti tentang kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dengan hasil bahwa rumusan penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan data tidak menunjukkan angka penurunan selama sepuluh tahun terakhir perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Hasil diskusi

menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) terdapat tiga poin penting yaitu ketersediaan data guna memetakan jenis kemiskinan yang terjadi perlu di perbaharui dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan informasi dan keterlibatan berbagai dinas terkait. Kedua, percepatan program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memberikan angin segar bagi masyarakat yang tergolong miskin. Ketiga, kebijakan jangka panjang kiranya perlu difikirkan secara matang melihat kondisi lapangan terdapat perubahan-perubahan faktor penyebab kemiskinan. Sehingga, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu.

Lain halnya dengan Akerele & Adewuyi (2011), menemukan bahwa 38,30 persen kemiskinan di tingkat rumah tangga disebabkan oleh pendidikan yang kurang dan sulitnya akses ke fasilitas keuangan seperti perbankan. Banyaknya anggota keluarga juga menjadi penyebab kemiskinan di tingkat rumah tangga dengan jumlah 7-9 orang per kepala keluarga. Solusi atas permasalahan tersebut yaitu meningkatkan tingkat pendidikan kepala keluarga, mempermudah akses ke lembaga keuangan, meningkatkan kemampuan dalam bekerja, serta investasi dalam pembangunan infrastruktur.

Lebih lanjut, penelitian lainnya yang mendukung dilakukan oleh Amin *et al* (2018) juga meneliti tentang kemiskinan dengan memfokuskan lokasi di Provinsi Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan penanggulangan kemiskinan mengalami perbaikan capaian indikator

nasmun relevansi kebijakan melum menunjukkan keselarasan dengan target nasional. Sehingga, kedepan harus lebih fokus pada determinan kemiskinan terutama pembentul peningkatan pengeluaran belanja makanan dan non makanan.

Oleh karena hal tersebut, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada faktor penyebab kemiskinan dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui progrma percepatan pengetasan kemiskinan. Sedangkan pada penelitian ini memetakan dan menganalisis keluarga miskin untuk mengetahui profil keluarga yang masuk dalam katagori miskin dan mengambil peran guna memberikan masukan kepada pemerintah setempat dan usaha-usaha yang dapat di ambil untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Sumatera. Tahun 2021, sebanyak 500,81 ribu jiwa tergolong penduduk miskin karena pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan I tahun 2021 (0,41 persen), perekonomian Riau tumbuh melambat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,11 persen. Factor lainnya yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I tahun 2021 juga berkontraksi sebesar -2,24 persen. Padahal di tahun 2020 tumbuh sebesar 1,48 persen (Susanti, 2021). Lebih lanjut, kemiskinan di Provinsi Riau juga disebabkan oleh kenaikan harga eceran beberapa komoditas pokok dan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan sebesar 0,04 persen.

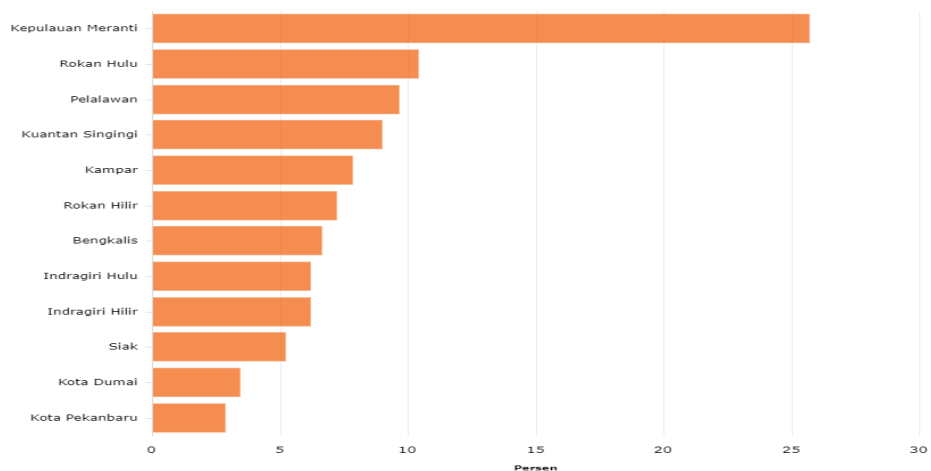
Berdasarkan data yang di himpun, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan bagian dari Provinsi Riau tergolong dalam daerah yang rawan akan bencana alam. Secara geografis, letak wilayah ini terdiri atas dataran rendah, perbukitan, dan rawa-rawa. Bagian terluas dari dataran rendah berkisar pada ketinggian 25 s/d 100 meter diatas permukaan air laut. Terlebih lagi sebagian besar merupakan hutan dan tanah gambut. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki potensi yang lebih besar terjadi bencana banjir. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu berada di urutan ke-8 untuk katagori tingkat kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kepulauan Meranti meenempati urutan pertama dalam katagori ini. Namun dalam penelitian ini di fokuskan pada Kabupaten Indragiri Hulu dengan berbagai alasan seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya.

Adapun alasan tersebut didukung oleh Istijoso *et al* (2016), yang menyebutkan bahwa kriteria penduduk miskin dapat dilihat dari kelompok variabel dan variabel-variabel pemebentuknya dalam setiap kelompok variabel. Kelompok variabel dapat di pisahkan menjadi beberapa yaitu kepemilikan kekayaan atau aset, kepemilikan hewan ternak, status perkawinan, jenis kelamin kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya, status bekerja, sektor pekerjaan, akses kepada lembaga keuangan, konsumsi makanan dan indikator kesehatan, indikator

kesejahteraan lainnya, serta partisipasi dalam politik dan akses terhadap informasi. Bila merujuk pada beberapa kelompok variabel tersebut, maka melihat bentang geografis di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dikategorikan terdapat kesulitan untuk mengakses beberapa lokasi dan jarak tempuh yang jauh. Kondisi lainnya adalah masih banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan berbagai kelompok variabel yang dialami.

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau, 2021

Lebih lanjut, focus penelitian dilakukan di 7 dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Pasir Peny, Kecamatan Lirik, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim,



dan Kecamatan Rengat. Kecamatan-kecamatan tersebut dipilih berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan focus pada jumlah desa, kepala keluarga, dan luas lahan yang terkena bencana banjir. RPJMD tersebut menganalisis bahwa sepanjang tahun rencana pembangunan dibuat, terdapat peningkatan baik jumlah desa, kepala keluarga, dan luas lahan yang terkena bencana banjir. Tidak hanya banjir, 7 kecamatan tersebut juga mengalami bencana kekeringan dan kenaikan suhu udara harian bila musim kemarau tiba.

Analisis terkait kemiskinan, tujuh kecamatan tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda. Namun pokok permasalahannya sama yaitu selalu di landa bencana ketika musim penghujan dan kemarau tiba. Sehingga setiap tahunnya harus menghadapi bencana yang sama secara berulang-ulang. Fenomena ini lah yang kemudian menjadi dasar awal pengambilan sampel penelitian yang kemudian mengarah pada ketahanan rumah tangga dalam menghadapi musibah yang terus terjadi ditengah tingkat kesejahteraan yang belum seutuhnya mereka rasakan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut penulis ingin memfokuskan penelitian pada kemiskinan yang dihadapi di 7 kecamatan berdasarkan bencana kebakaran yang terjadi setiap tahunnya dengan mengidentifikasi keluarga miskin yang terkena dampak dari bencana tersebut menggunakan indikator-indikator yang sesuai. Sehingga didapatkan profil keluarga miskin yang kemudian di analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.2 Tujuan Penelitian

Tahun ke-1

Mengidentifikasi Profil keluarga miskin dan Pemetaan keluarga miskin

Tahun ke-2

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di tingkat rumah tangga.

1.3 Urgensi Penelitian

Sebagai informasi pemetaan dan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di tingkat rumah tangga.

1.4 Kebaharuan Penelitian

Belum banyak penelitian yang membahas pemetaan dan analisis profil keluarga miskin. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian

ini membahas hampir keseluruhan faktor penyebab kemiskinan di tingkat rumah tangga dengan cara memetakan terlebih dahulu kemudian menganalisis fenomena kemiskinan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kemiskinan digambarkan sebagai lemahnya kemampuan berusaha dan terbatasnya akses pada kegiatan perekonomian, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki akses lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat mendorong tindakan yang melawan hukum bahkan nilai kemanusiaan. Jika nilai dari golongan atas dipakai sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya masyarakat yang tergolong miskin dapat dikatakan dalam kondisi kemanusiaan yang rendah (Januarisman, 2021).

Beberapa literatur menegaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, baik eksternal maupun internal. Ditingkat rumah tangga, faktor eksternal meliputi sulitnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, fasilitas sanitasi dan layanan air bersih, serta keterbatasan terhadap akses pendanaan dan kapasitas usaha (Sa'diyah & Arianti, 2012). Sedangkan, faktor internal seperti konsumsi, pendapatan, pendidikan tertinggi kepala keluarga, tidak memiliki tabungan, serta klasifikasi bangunan rumah (Widodo, 2006). Atas dasar faktor tersebut, dapat petakkan terkait profil keluarga miskin dengan memetakan informasi yang diperoleh serta menganalisis berdasarkan kajian-kajian yang digunakan.

2.2 Definisi Kemiskinan

World Bank mendefinisikan kemiskinan yaitu *Poverty is hunger, poverty is lack of shelter, poverty is being sick and not being able to see doctor, poverty is not having access to school and knowing how to read, poverty is not having job, is fear for the future, living one day at time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerless, lack of representation and freedom* (Sekjen DPR RI, 2015). Menurut Ritonga (2003), kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya seperti sandang, pangan, dan papan.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2018), mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Menurut Suharto dalam Sjafari (2014), kemiskinan merupakan persoalan kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Meskipun sampai saat ini belum ada yang menemukan jalan keluar untuk menangani masalah kemiskinan, tetapi harus terus diupayakan untuk mencari solusi agar kemiskinan dapat

dikurangi. Sedangkan menurut Cox dalam Utomo (2014) kemiskinan terbagi atas beberapa bagian yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial, dan kemiskinan konsekuensial.

2.3 Indikator Kemiskinan

Makna dari kemiskinan ialah satu kondisi dimana seseorang atau keluarga berada dalam ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, psikis, politis, maupun budaya dalam mewujudkan kehidupan yang layak. Hermawati (2015), konsep kemiskinan diukur dalam dua kategori yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.

a. Indikator Kuantitatif Kemiskinan

Indikator kuantitatif kemiskinan yang digunakan sebagai acuan adalah indikator obyektif yang digunakan oleh BPS dan *World Bank*. Indikator yang dimaksud yaitu berupa pengeluaran konsumsi rata-rata keluarga per hari yang setara dengan 2100 kalori/orang/hari atau ekuivalen dengan pendapatan penduduk sebesar 1,55 dolar AS per hari. Dapat dikatakan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila ia tinggal dalam rumah tangga dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan.

b. Indikator Kualitatif Kemiskinan

Indikator kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fenomena kemiskinan karena respon seseorang terhadap dimensi yang diukur dalam penelitian ini sangat subyektif dan

kontekstual, sehingga perlu pendekatan yang lebih mendalam dalam penggalian data. Indikator kualitatif kemiskinan menurut Muttaqin (2006) mencakup:

1. Terbatasnya kebutuhan makanan yang layak secara kesehatan.
2. Terbatasnya kebutuhan perumahan yang layak secara kesehatan.
3. Terbatasnya kebutuhan sandang/pakaian yang layak.
4. Terbatasnya akses pendidikan berkualitas.
5. Terbatas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
6. Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
7. Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan.
8. Terbatasnya akses informasi.
9. Terbatasnya akses transportasi..
10. Terbatasnya akses sosial.
11. Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomis strategis.
12. Terbatasnya akses pelayanan pemerintahan.
13. Terbatasnya tingkat partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.
14. Kurangnya rasa aman (takut, curiga, apatis).
15. Kurangnya rasa percaya diri.

16. Terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan waktu luang.
17. Terbatasnya kemampuan resolusi konflik dan masalah sosial (rentan guncangan yang sifatnya individual maupun masal).
18. Buruknya kualitas lingkungan, baik secara kesehatan maupun secara sosial.
19. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat.
20. Rendahnya etos kerja (malas dan tidak suka bekerja keras).
21. Kurang suka menabung/ berinvestasi (budaya konsumtif/ gaya hidup hedonisme).
22. Kurang berorientasi ke masa depan.
23. Sikap nrimo dan mudah menyerah pada nasib/ takdir.
24. Sikap tergantung (dependen).

2.4 Indikator Keluarga Miskin

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan menghasilkan pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konstan dengan pelaporan bulanan dari pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kepada BKKBN pusat. Terdapat 5 katagori kesejahteraan yang digunakan untuk penargetan keluarga miskin yaitu (1) keluarga prasejahtera (Pra-KS); (2) Keluarga Sejahtera 1 (KS1); (3) Keluarga Sejahtera 2 (KS2); (4) Keluarga Sejahtera 3 (KS3); dan (5) Keluarga Sejahtera Plus (KS3 Plus). Kelima katagori tersebut kemudian di turunkan menjadi 23 indikator penentuan keluarga sejahtera, yangmana

ketika keluarga tergolong dalam Pra-KS maka setidaknya keluarga tersebut belum memenuhi kebutuhan dasarnya seperti anggota keluarga belum melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, tidak dapat makan minimal 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian berbeda, lantai rumah masih tanah, dan bila sakit tidak dibawa ke sarana kesehatan.

Pada katagori KS1, merupakan kebalikan dari Pra-KS. Artinya bahwa kelima indikator tersebut sudah terpenuhi, maka suatu keluarga tersebut dapat dikatagorikan memiliki kesejahteraan pada tingkatan KS1. Lebih lanjut, pada kriteria KS2 maka standar dikatakan dalam kelompok tersebut setidaknya sudah memenuhi 14 indikator dari 23 total indikator. Keluarga dikatakan tergolong dalam KS3 bila sudah memenuhi 21 indikator dari total indikator menurut BKKBN. Terakhir, bila suatu keluarga dikatakan memiliki kesejahteraan maka sudah terpenuhi 23 indikator dan dikatagorikan dalam KS3 Plus.

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005, BPS juga melakukan pendataan dengan sistem Pendataan Sosial-Ekonomi Tahun 2005 (PSE05). BPS menentukan kriteria rumah tangga miskin menggunakan 14 variabel yang terdiri atas katagori yaitu luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging dan susu, frekuensi makan dalam sehari, jumlah stel pakaian, akses ke puskesmas, akses ke lapangan pekerjaan, pendidikan terakhir kepala rumah tangga, dan kepemilikan asset. 14 variabel tersebut kemudiah diperjelas dalam PSE05

sesuai dengan standar rumah tangga tidak dikatakan miskin. Hasil pendataan rumah tangga miskin kemudian ditentukan skornya yaitu antara 1 atau 0. Skor 1 menunjukkan bahwa variabel yang mengidentifikasi rumah tangga miskin, sedangkan skor 0 menunjukkan variabel yang mengidentifikasikan keluarga tidak miskin. Penskoran tersebut memiliki kelemahan yaitu perbedaan indikasi atau standar rumah tangga miskin sehingga perlu dilakukan pembobotan. Hasil dari pembobotan tersebut kemudian dihitung nilai indeks untuk memperoleh katagori keparahan kemiskinan suatu rumah tangga. Selanjutnya, kemiskinan di tingkat rumah tangga kemudian dapat dibedakan menjadi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga mendekati miskin, dan rumah tangga tidak miskin.

2.5. Kebakaran Hutan

Fenomena kebakaran hutan seringkali terjadi di Indonesia baik dalam skala kecil maupun skala besar. Lestari (2010) menjelaskan kejadian terbakarnya hutan seringkali terjadi bukan karena faktor alam, melainkan sengaja untuk dibakar dengan tujuan membuka lahan dan mengalih fungsikan hutan menjadi lahan pertanian dan/atau sebagainya. Dampak yang disebabkan dari kebakaran hutan antara lain kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara bahkan hingga mengganggu aktivitas di negara tetangga.

2.6. Penyebab Kebakaran Hutan

Sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor alam. Faktor alam yang dapat menyebabkan kebakaran hutan yaitu seperti adanya sambaran petir, perubahan iklim bumi, letusan gunung, dan sebagainya. Perdebatan mengenai penyebab utama kebakaran hutan selalu menjadi perdebatan. Dalam beberapa hasil studi menemukan bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah karena faktor aktivitas manusia akibat pembukaan lahan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk perkebunan sawit dan industri kayu.

Pembukaan hutan oleh pemegang HPH serta perusahaan perkebunan dengan tujuan untuk pengembangan tanaman industri dan perkebunan umumnya mencakup areal yang cukup luas. Metode pembukaan lahan dengan menebang habis dan membakar hutan merupakan cara alternatif pembukaan lahan yang paling murah, mudah dan cepat. Namun metode ini sering berakibat pada kebakaran yang merambat pada area yang berada di luar lahan yang telah ditentukan.

2.7. State of Art Penelitian dan Roadmap Penelitian

2.4.1 State of Art Penelitian

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
1.	(Nama; Judul; Tahun; sumber) D. Akerele and S.A. Adewuyi; “ <i>Analysis of Poverty Profiles and Socioeconomic Determinants of Welfare among Urban Households of Ekiti State, Nigeria</i> ” ; 2011;	Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif statistik, perhitungan indeks kemiskinan, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38,30 persen rumah tangga yang termasuk dalam observasi berstatus miskin. Rumah tangga yang memiliki kepala keluarga perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Tingkat tertinggi kemiskinan ditemukan diantara rumah tangga dengan 7-9 tanggungan dalam satu rumah. Kesejahteraan rumah tangga juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan rasio ketergantungan terhadap pihak lain. Sehingga mendorong kemudahan

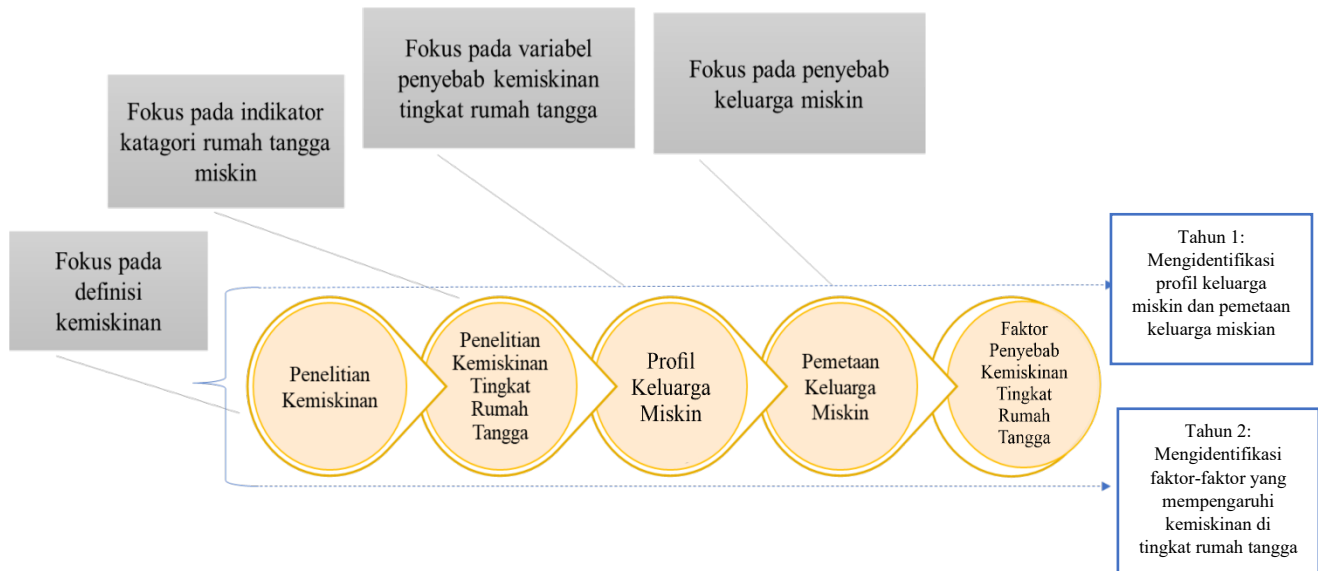
NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
	(Nama; Judul;Tahun; sumber)	akses terhadap hal-hal tersebut menjadi solusi.
2.	Acharya, Krishna Prasad ; “Analysis of Poverty Profile by Type of House of Households in Nepal” ; 2018 ;	Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 25,20 persen observasi termasuk rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan dan memiliki kesenjangan kemiskinan rata-rata lebih dari 5 persen. Rumah tangga yang tinggal di rumah tipe Pakki cenderung lebih miskin dibandingkan dengan mereka yang tidak tinggal di rumah tipe non-pakki.
3.	Matos, Leal, Pontes, and Silva ; “ <i>Poverty and Family Resilience in Belem-Para</i> ” ; 2021	Alat analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif, korelatif dan eksploratif. Hasil menunjukkan bahwa keluarga yang termasuk dalam responden merupakan keluarga yang miskin

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
(Nama; Judul;Tahun; sumber)		
		<p>meskipun tidak mengalami kemiskinan ekstrem. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar perempuan menjadi kepala keluarga dan berperan sebagai orang tua tunggal. Hal tersebut menyebabkan ketahanan keluarga dan aspek pendukung lainnya seperti pekerjaan, pengetahuan, kemanusiaan, dan perkembangan anak sulit untuk dipenuhi.</p>
4.	<p>Rozanti, Khusaini, and Prasetyia ; “<i>Determinants of Household Poverty Status in Kediri City</i>” ; 2021 ;</p>	<p>Alat analisis yang dipakai yaitu model regresi logit berurut dan perhitungan efek marginal. Hasil menunjukkan bahwa kepala rumah tangga perempuan, usia kepala rumah tangga, pendidikan anggota keluarga, pekerjaan anggota keluarga, kemudahan terhadap kepemilikan asset, akses internet., akses sanitasi</p>

NO	Keterangan (Nama; Judul;Tahun; sumber)	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
		<p>yang layak, dan akses lembaga keuangan akan mengurangi rumah tangga tersebut termasuk dalam rumah tangga sangat miskin dan miskin. Hasil lainnya yaitu kesejahteraan rumah tangga di pengaruhi oleh karakteristik kepala rumah tangga dalam mengelola asset produktif, dukungan terhadap akses infrastruktur. Namun, rasio ketergantungan, status pernikahan, usia kepala keluarga, dan sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan akan menjadikan rumah tangga tergolong dalam katagori miskin dan sangat miskin.</p>
5.	<p>Prasetya, Andika Dwi ; “<i>The Determinants of Households Poverty in Indonesia: Case Study of Individual in</i></p>	<p>Alat analisis yang digunakan yaitu STATA 11 SE dengan metode Odds Ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan Pekerjaan</p>

NO	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
(Nama; Judul;Tahun; sumber)	<i>Household of Indonesia Family Live Survey (IFLS)</i> ” ; 2016	berpengaruh kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Sementara itu, faktor determinan lainnya, seperti seperti, jenis kelamin, dan status perkawinan tidak berpengaruh terhadap determinan rumah tangga kemiskinan di Indonesia.

2.6.2 Roadmap Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Deskriptif

Data kualitatif dapat diartikan sebagai data yang berhubungan dengan angka-angka baik yang diperoleh dari pengukuran ataupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Sementara itu, metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil dari variabel yang diteliti dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara generalisasi.

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana variabel yang akan digunakan dan dijelaskan adalah kemiskinan. Adapun indikator kemiskinan secara kualitatif yaitu:

1. Terbatasnya kebutuhan makanan yang layak secara kesehatan.
2. Terbatasnya kebutuhan perumahan yang layak secara kesehatan.
3. Terbatasnya kebutuhan sandang/pakaian yang layak.
4. Terbatasnya akses pendidikan berkualitas.
5. Terbatas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

6. Terbatasnya peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan.
7. Terbatasnya akses air bersih yang layak bagi kesehatan.
8. Terbatasnya akses informasi.
9. Terbatasnya akses transportasi..
10. Terbatasnya akses sosial.
11. Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomis strategis.
12. Terbatasnya akses pelayanan pemerintahan.
13. Terbatasnya tingkat partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik.
14. Kurangnya rasa aman (takut, curiga, apatis).
15. Kurangnya rasa percaya diri.
16. Terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan waktu luang.
17. Terbatasnya kemampuan resolusi konflik dan masalah sosial (rentan guncangan yang sifatnya individual maupun masal).
18. Buruknya kualitas lingkungan, baik secara kesehatan maupun secara sosial.
19. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat.
20. Rendahnya etos kerja (malas dan tidak suka bekerja keras).
21. Kurang suka menabung/ berinvestasi (budaya konsumtif/ gaya hidup hedonisme).
22. Kurang berorientasi ke masa depan.

23. Sikap nrimo dan mudah menyerah pada nasib/ takdir.

24. Sikap tergantung (dependen).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan data yang diharapkan, maka peneliti akan menggunakan beberapa metode, diantaranya angket/kuesioner dan Penelitian Pustaka.

- a. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan berisi satu set pertanyaan berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini akan diajukan angket rumah tangga miskin di Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan topik dan masalah yang dibahas.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai berikut:

- a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah corrected item total correlation atau nilai r hitung harus berada diatas 0,3 hal ini dikarenakan jika r hitung lebih kecil dari 0,3 maka item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-item pernyataan lainnya daripada variabel yang diteliti sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu keadaan yang konsisten dengan tujuan untuk mengukur konsistensi indikator (variabel) penelitian, selain itu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

c. Uji Statistik

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui ketepatan antara nilai dugaan dengan nilai regresi. Hasilnya dapat dilihat pada proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan nilai antara 0 sampai 1. Dalam uji empiris, bila hasil dari *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka dianggap bernilai 0.

2) Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Uji F merupakan pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F memiliki kriteria sebagai berikut:

i) Membandingkan nilai F tabel dengan F hitung

Apabila $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

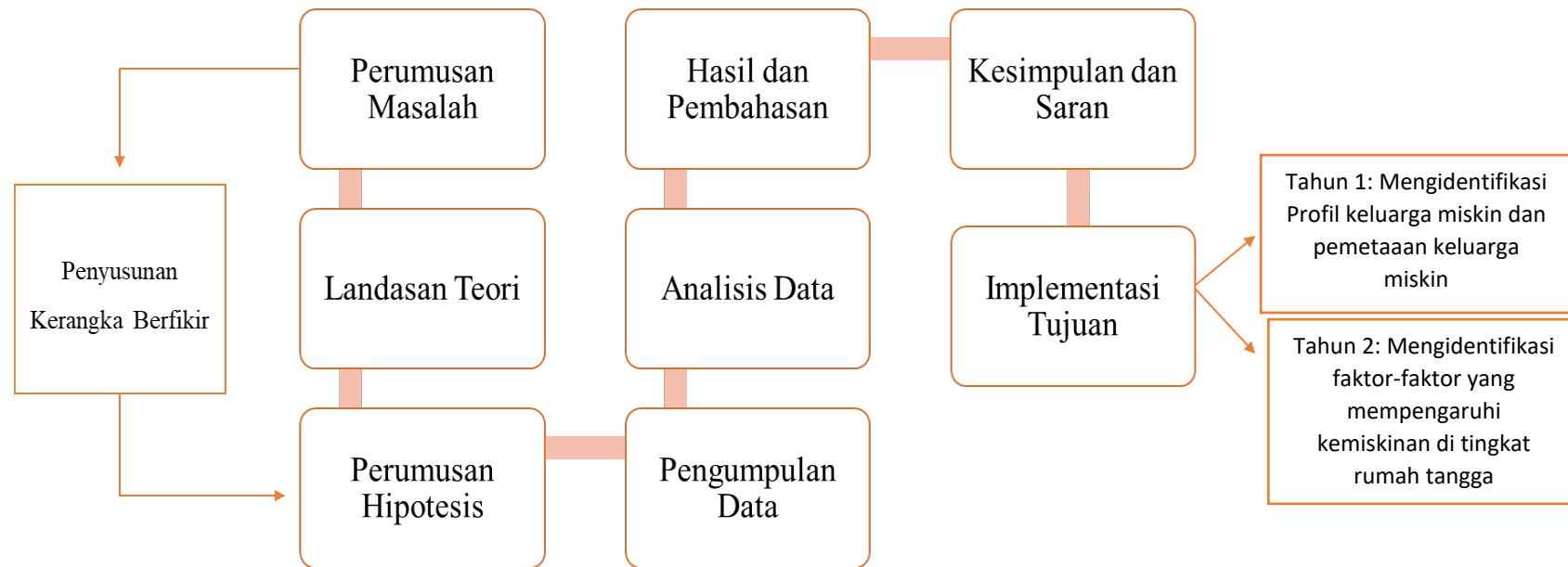
ii) Menggunakan angka probabilitas signifikansi

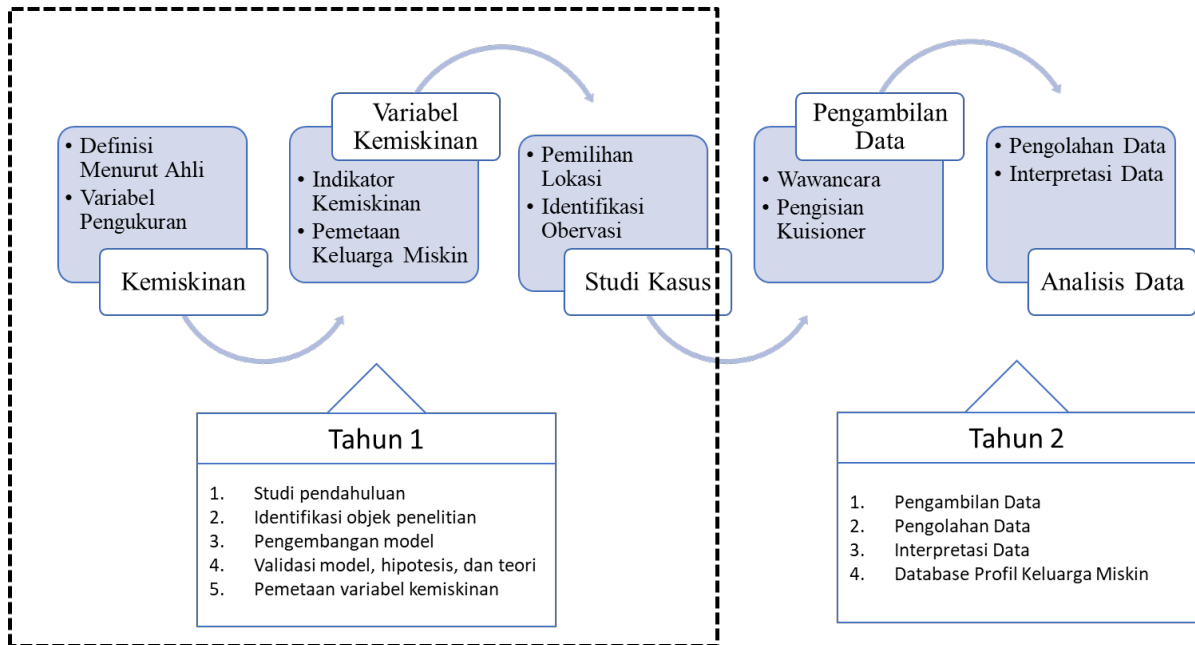
Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

d. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial dan dapat menunjukkan sejauh mana satu variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara individual. Uji ini dilakukan menggunakan nilai dari t statistik dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen, yang kemudian di bandingkan dengan nilai t tabel. Selain cara tersebut penentuan nilai dari uji t dapat dilakukan dengan melihat $P > |t|$, dimana ketika nilai $P > |t| < 0,05$ maka signifikan dan bila $P > |t| > 0,05$ maka tidak signifikan.





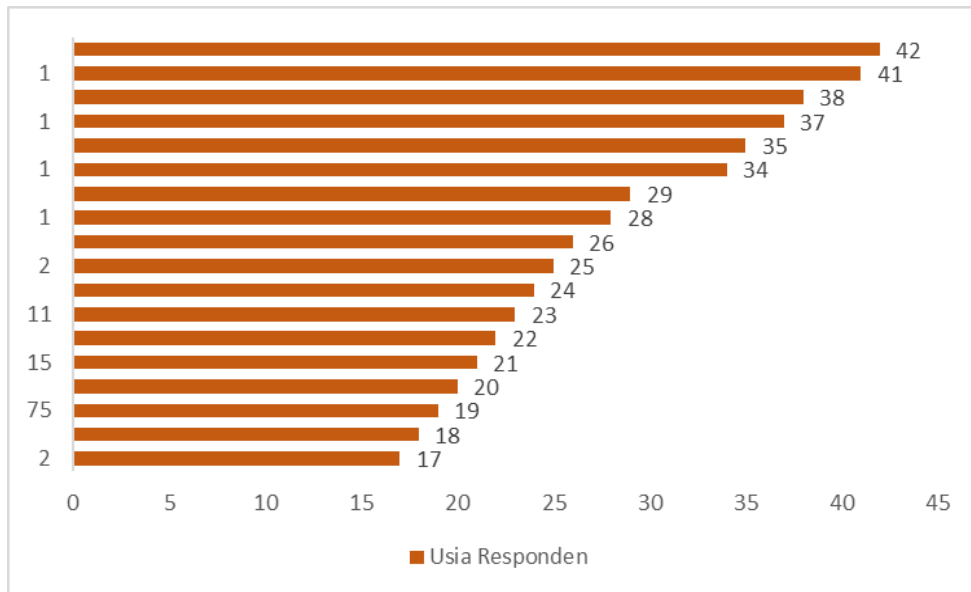
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 217 responden dengan berbagai jenis pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Adapun distribusi usia responden antara usia 17 tahun hingga 42 tahun dengan rata-rata usia yang menjadi responden yaitu 19 tahun. Dari 217 responden, terdapat 39 responden berusia 18 tahun, 75 responden yang berusia 19 tahun, 44 responden berusia 20 tahun. Sisanya berusia antara 21 tahun hingga 42 tahun.

Gambar 4.1 Distribusi Usia Responden

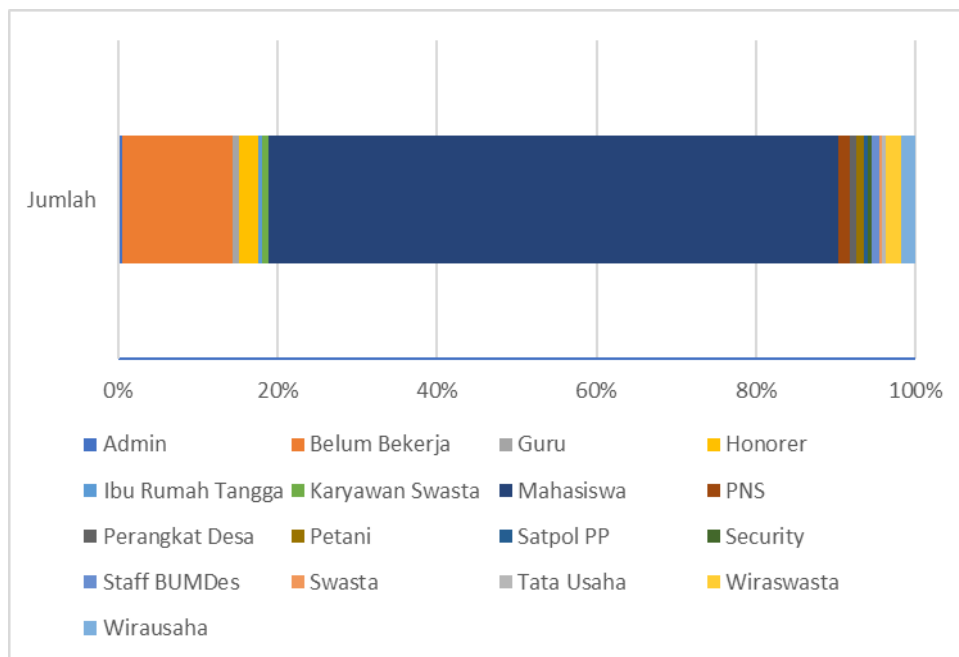


Sumber: Data Diolah, 2023

Jenis pekerjaan responden bermacam-macam, baik berstatus mahasiswa hingga bekerja sebagai karyawan swasta. Terlihat di Gambar 4.2 bahwa pekerjaan yang mendominasi yaitu berstatus sebagai mahasiswa

sebanyak 155 responden. Peringkat kedua yaitu responden yang belum bekerja sebanyak 30 responden. Adapun yang bekerja disektor swasta sebanyak 5 responden. Jenis pekerjaan sebagai wirausaha dan wiraswasta masing-masing berjumlah 4 responden. Sisanya tersebar dibeberapa pekerjaan yang dijelaskan melalui gambar dibawah ini.

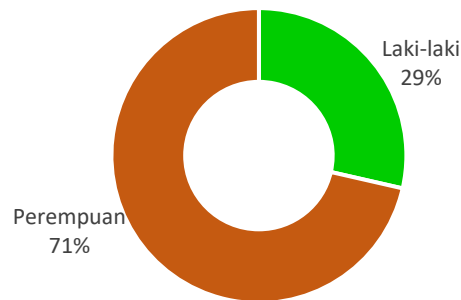
Gambar 4.2 Distribusi Jenis Pekerjaan Responden



Sumber: Data Diolah, 2023

Kemudian untuk jenis kelamin responden, perempuan mendominasi dengan jumlah 155 responden atau sebesar 71 persen. Sisanya, sebanyak 62 responden atau 29 persen dari total responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dikarenakan banyaknya responden yang siap diwawancarai sebagian besar perempuan. Sehingga proporsi keduanya selisih lebih dari 50 persen. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Distribusi Jenis Kelamin Responden



Sumber: Data Diolah, 2023

4.2 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data. Hasil olah data menunjukkan bahwa setiap kuisisioner telah memenuhi persyaratan dari uji validitas, yaitu nilainya lebih dari r tabel. Adapun perhitungan r tabel diperoleh dari $df = N - 2$ atau $217 - 2 = 215$. Nilai tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai pada r tabel yang menggunakan hipotesis satu arah (0.05) dengan N berada dibaris 300. Sehingga, nilai r tabel yang digunakan yaitu 0.113.

Terlihat dari Tabel 4.1 bahwa nilai r hitung dari setiap pertanyaan telah melebihi r tabel yaitu 0.113. Adapun rata-rata nilai r hitung berada di angka 0.755 dengan nilai r hitung tertinggi pada pertanyaan dengan kode Q11 yaitu Terbatasnya kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomis strategis. Secara umum, seluruh pertanyaan telah terbukti valid sehingga dapat digunakan untuk menganalisis data.

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas

Kode	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Q1	0.746	0.113	Valid
Q2	0.692	0.113	Valid
Q3	0.752	0.113	Valid
Q4	0.839	0.113	Valid
Q5	0.785	0.113	Valid
Q6	0.749	0.113	Valid
Q7	0.759	0.113	Valid
Q8	0.749	0.113	Valid
Q9	0.780	0.113	Valid
Q10	0.740	0.113	Valid
Q11	0.845	0.113	Valid
Q12	0.787	0.113	Valid
Q13	0.810	0.113	Valid
Q14	0.750	0.113	Valid
Q15	0.763	0.113	Valid
Q16	0.743	0.113	Valid
Q17	0.789	0.113	Valid
Q18	0.695	0.113	Valid
Q19	0.752	0.113	Valid
Q20	0.760	0.113	Valid
Q21	0.749	0.113	Valid
Q22	0.753	0.113	Valid
Q23	0.697	0.113	Valid
Q24	0.655	0.113	Valid

Sumber: Data Diolah, 2023

4.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu keadaan yang konsisten dengan tujuan untuk mengukur konsistensi indikator (variabel) penelitian, selain itu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas diukur berdasarkan nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 maka dapat dinyatakan

pertanyaan tersebut reliabel. Gambar 4.4 merupakan hasil uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas sebesar 0.9686. Artinya bahwa kuisisioner tersebut telah memenuhi syarat uji reliabilitas, sehingga konsistensi atas skor dalam pertanyaan tersebut dinyatakan konsisten. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa jawaban atas pertanyaan yang diajukan dapat dilanjutkan untuk analisis data.

Gambar 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

```
Test scale = mean(unstandardized items)

Average interitem covariance:      .8843803
Number of items in the scale:      24
Scale reliability coefficient:      0.9686
```

Sumber: Data Diolah, 2023

4.4 Analisis Kuisisioner

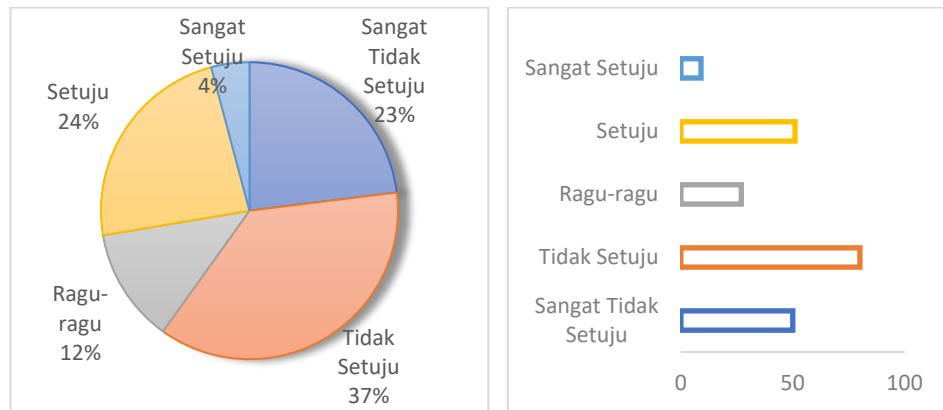
Abdillah, Vincent, & Samudro (2019), kebutuhan primer yaitu makanan menjadi sumber energi bagi manusia. Terjadinya kemiskinan ditingkat rumah tangga memberikan dampak terhadap pola konsumsinya. Sehingga kemampuan rumah tangga dalam kegiatan konsumsi akan selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tingkat kesejahteraan. Semakin besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun, bila rumah tangga lebih banyak pengeluaran terhadap makanan saja maka terindikasi bahwa rumah tangga tersebut tergolong miskin. Hal tersebut terjadi karena kemampuan rumah tangga berpusat hanya pada

pemenuhan kebutuhan primer. Padahal pergeseran pola pengeluaran dari makanan ke non makanan menggambarkan bahwa kemampuan rumah tangga mengalami peningkatan kearah kesejahteraan yang lebih baik. Athadena (2021), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh pendidikan dan kesehatan yaitu ketika tingkat pendidikan dan kesehatan meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Teori kemiskinan keynesian menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi akibat dari faktor struktural yang bersifat ekonomi, sosial, ataupun politik. Sedangkan, teori lingkaran setan menyebutkan bahwa terdapat hubungan kualitas sumber daya terhadap kemiskinan. Artinya bahwa tingkat pendapatan yang rendah dapat disebabkan oleh produktivitas yang rendah, akibatnya kemampuan untuk menyimpan atau menabung menurun. Penurunan tersebut berakibat pada rendahnya investasi yang berakibat pada kurangnya modal untuk mendukung produktivitas. Bila semua aspek tersebut terjadi dan tidak diputus rantainya, maka kemiskinan akan berlanjut terus menerus.

Hasil olah data dalam kuisisioner, responden menyatakan bahwa akses terhadap makanan yang layak secara kesehatan mudah untuk didapatkan. Artinya bahwa sebesar 36,87 persen responden tidak setuju bahwa terdapat keterbatasan dalam akses kebutuhan makanan yang layak. Disisi lain, terdapat 51 responden yang menyatakan bahwa masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan makanan yang layak sesuai standar kesehatan.

Tabel 4.5 Terbatasnya Kebutuhan Makanan Yang Layak Secara Kesehatan



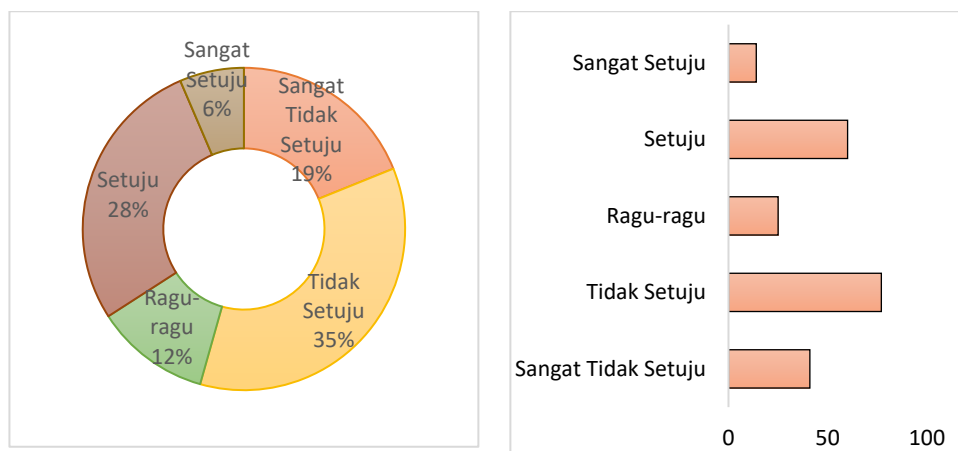
Sumber: Data Diolah, 2023

Kebutuhan perumahan menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerinatah. Terlebih dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka perubahan penggunaan tanah menjadi daerah pemukiman semakin meningkat. Akibatnya eksploitasi sumber daya alam yang digunakan untuk bahan bangunan juga akan meningkat. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan tanah mengikuti deret hitung. Artinya bahwa ketersediaan tanah sebagai lokasi perumahan sifatnya tetap, dan bila ada ketersediaan lahan dapat dihitung. Namun pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya.

Hasil kuisisioner menyebutkan bahwa sebanyak 74 orang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak secara kesehatan. Sebesar 11,52 persen berpendapat ragu-ragu atas terbatasnya kebutuhan perumahan. Artinya bahwa sebanyak 25 orang masih belum mengetahui standar layak perumahan sesuai dengan kesehatan. Sedangkan, 35,49 persen menyatakan tidak setuju bahwa akses terhadap perumahan

masih sulit. Kemudian dipertegas oleh 41 orang yang menyatakan sangat tidak setuju bahwa akses terhadap kebutuhan perumahan masih terbatas bahkan yang layak secara kesehatan. Dapat dipahami bahwa dari seluruh jawaban responden terdapat pembagian akses yang cukup merata antara yang mudah dan sulit dalam mengakses perumahan yang layak.

Tabel 4.6 Terbatasnya Kebutuhan Perumahan Yang Layak Secara Kesehatan

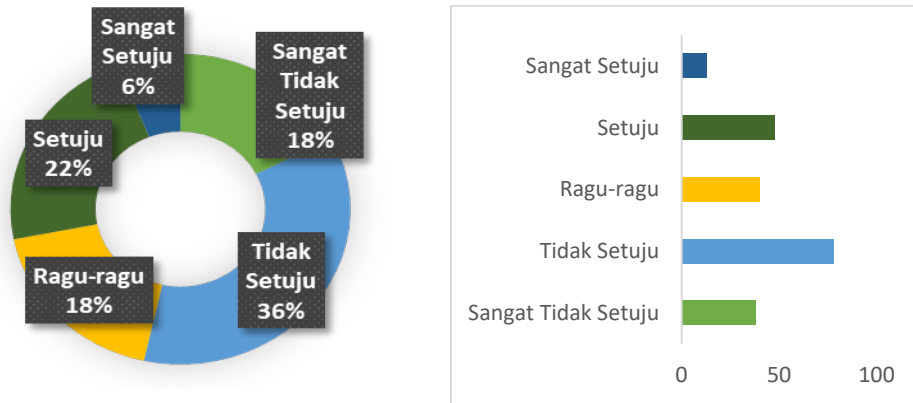


Sumber: Data Diolah, 2023

Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat penting. Kebutuhan sandang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Teori Hirarki Kebutuhan atau Teori Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan manusia dibagi menjadi lima tingkatan, salah satunya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup yang meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan seks. Dari hasil kuisisioner diperoleh bahwa 116 responden tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa mereka memiliki keterbatasan terhadap pemenuhan sandang yang layak. Sedangkan 28 persen responden

berpendapat bahwa mereka masih memiliki akses yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan sandang.

Tabel 4.7 Terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Yang Layak



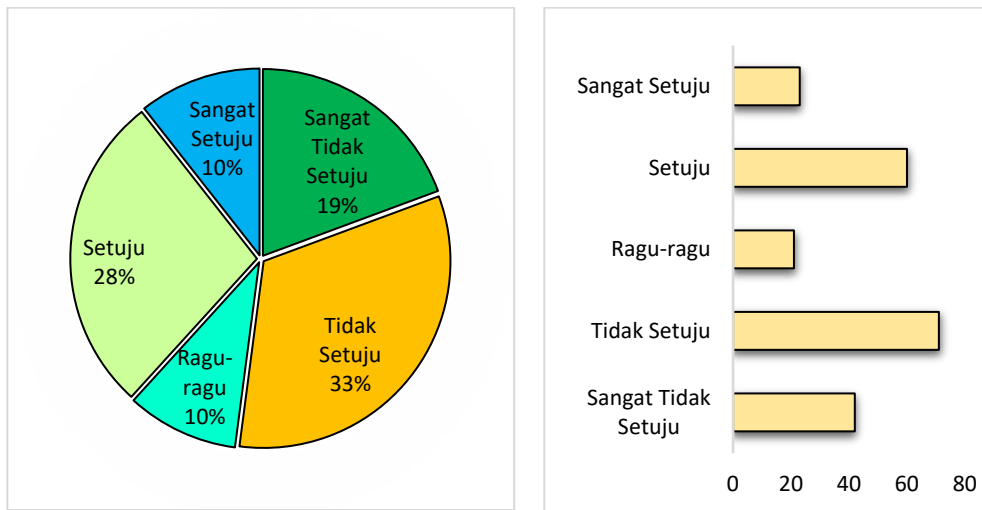
Sumber: Data Diolah, 2023

Kesenjangan pendidikan terjadi di hampir semua tingkat pendidikan. Akses pendidikan menjadi prioritas bagi setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akses tersebut dapat berupa sikap sosial nondiskriminatif, kebijakan dalam bentuk perundang-undangan, dan tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, serta dukungan lainnya yang memudahkan dalam proses belajar mengajar. Sanchez & Singh (2016), kemudahan akses pendidikan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu keterjangkauan wilayah geografis, cara pandang orang tua terhadap pendidikan, dan kesetaraan gender.

Sebanyak 71 responden memilih tidak setuju atas pertanyaan terbatasnya akses pendidikan berkualitas. Didukung oleh 42 responden memilih sangat tidak setuju atas pertanyaan yang sama. Artinya bahwa sebesar 52 persen responden memiliki akses pendidikan berkualitas yang baik dari berbagai tingkatan pendidikan. Sementara itu, 37 persen responden

dengan 60 orang setuju dan 23 orang sangat setuju, memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Bila dilihat dari letak geografis asal responden, maka keterjangkauan wilayah terhadap pusat wilayah relatif jauh dengan kondisi geografis yang beragam. Sehingga pendidikan yang berkualitas perlu usaha yang lebih dalam mengaksesnya.

Tabel 4.8 Terbatasnya Akses Pendidikan Berkualitas

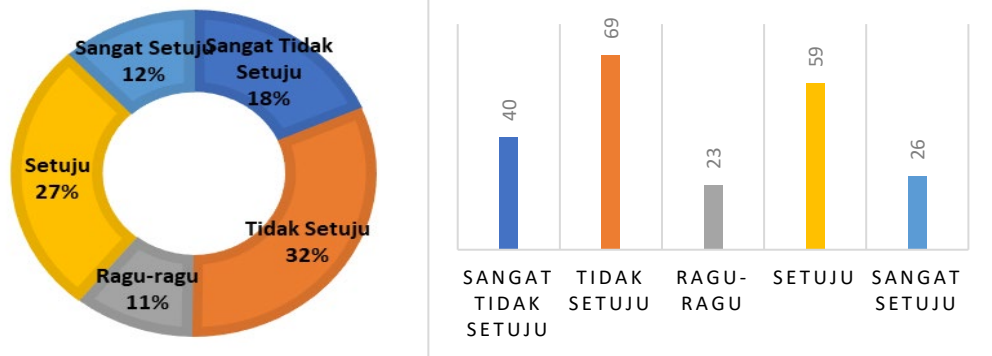


Sumber: Data Diolah, 2023

Notoadmodjo dalam Isroviyah (2022), menyebutkan bahwa kesehatan seseorang dapat dilihat dari produktivitasnya dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Selain itu, kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang mana tanpa adanya kesehatan yang layak tidak dapat menghasilkan produktivitas yang baik. Todaro menyatakan bahwa modal manusia salah satunya dapat diukur melalui kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dengan pelayanan yang sesuai dengan standar. Akses terhadap fasilitas kesehatan

akan membantu masyarakat dalam mencegah berbagai penyakit dan adanya kontrol kesehatan bagi yang membutuhkan.

Gambar 4.9 Terbatasnya Akses Pelayanan Kesehatan Yang Layak



Sumber: Data Diolah, 2023

Responden memberikan jawaban sebesar 18,42 persen tidak setuju bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan mengalami keterbatasan. Didukung oleh jawaban 69 orang yang menyatakan tidak setuju atas hal tersebut. namun sebanyak 59 orang berpendapat setuju bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas masih terdapat batasan. Sedangkan 12 persen lainnya bahkan berpendapat bahwa masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Artinya bahwa pelayanan kesehatan yang layak belum dominan terpenuhi diwilayah responden. Sehingga akses kesehatan baik jarak tempuh maupun pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu kurang dari 5 km dari rumah. Bila melihat kondisi geografis responden, akses jalan menjadi kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

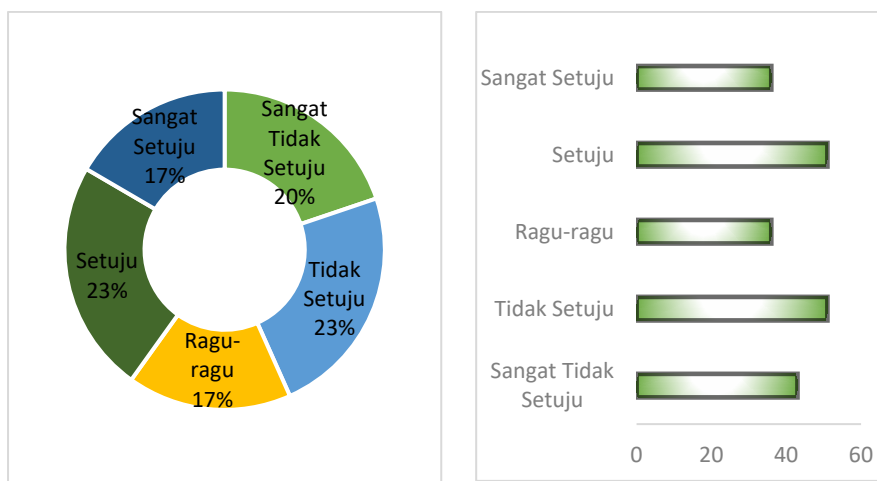
Peluang mendapatkan pekerjaan bergantung pada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai hubungan antara

tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan (Bellante & Jackson, 1990). Permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek harus melihat faktor produksi tenaga kerja yang dapat berubah jumlahnya, sedangkan faktor lain konstan. Sedangkan dalam jangka panjang, permintaan tenaga kerja mengasuksikan bahwa semua faktor produksi dapat berubah. Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi. Santoso (2012), menyebutkan bahwa keseimbangan tenaga kerja terjadi karena adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja dipasar tenaga kerja.

Peluang mendapatkan pekerjaan yang layak secara kemanusiaan juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau kualifikasi yang dibutuhkan dari perusahaan. Berdasarkan kuisisioner, jawaban responden sebesar 51 orang menyatakan tidak setuju bahwa masih terjadi batasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan 51 orang lainnya justru menyatakan setuju bahwa terdapat keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun secara umum, terdapat 42,3 persen menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa akses terhadap kesempatan mendapatkan pekerjaan masih mengalami keterbatasan. Hal lain yang perlu dicermati yaitu masih ada kesenjangan antara yang mudah dan terbatas dalam mendapatkan kesempatan pekerjaan yang layak.

Gambar 4.10 Terbatasnya Peluang Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak

Secara Kemanusiaan



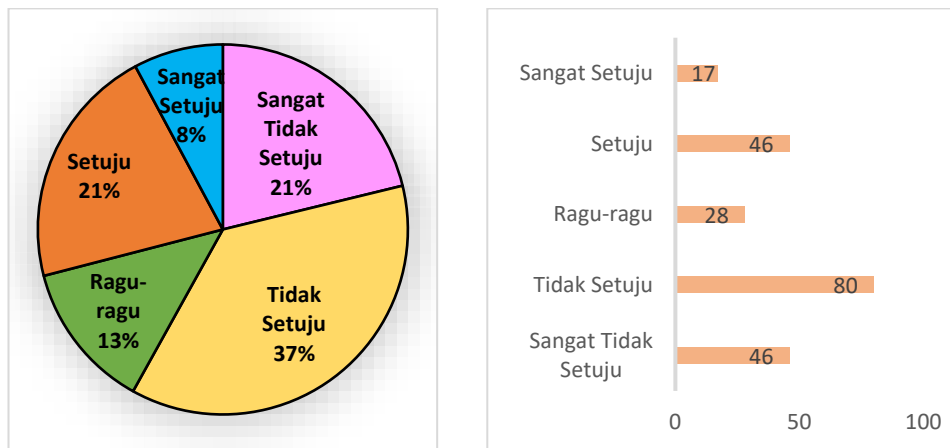
Sumber: Data Diolah, 2023

Air bersih merupakan sumber daya alam yang melimpah karena dapat ditemukan di setiap jengkal dari permukaan bumi yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Fungsi air secara langsung bagi kehidupan manusia antara lain untuk memasak, mencuci, mandi, minum, dan lain-lain. Sedangkan fungsi secara tidak langsung adalah untuk mengembangkan lingkungan hidupnya. Distribusi pemanfaatan air di setiap rumah tangga juga berbeda-beda pada setiap daerah yang dikarenakan adanya perbedaan kualitas sarana dan prasarana air bersih. Oleh karena itu, akses air bersih tidak hanya secara kuantitas terpenuhi tetapi juga dalam hal kualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Anita, 2020).

Responden menyatakan bahwa 36,87 persen tidak setuju dan 46 orang sangat tidak setuju bahwa terdapat keterbatasan akses air bersih untuk kehidupan mereka. Sedangkan, 7,8 persen responden masih kesulitan dalam mengakses air bersih yang layak. Didukung oleh 21,20 persen responden yang menyatakan setuju bahwa masih ada keterbatasan akses terhadap air

bersih yang layak bagi kesehatan. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa akses terhadap air bersih tidak mengalami kesulitan. Hanya saja kualitas air berbeda-beda di setiap daerah.

Gambar 4.11 Terbatasnya Akses Air Bersih Yang Layak Bagi Kesehatan



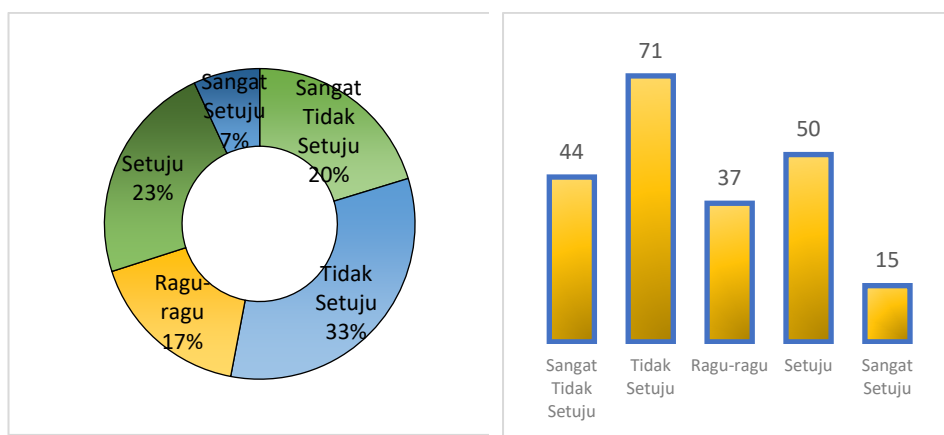
Sumber: Data Diolah, 2023

Informasi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan ide, mendapatkan peluang baru, dan pelajaran dari berbagai sumber. Akan jika mendapatkan informasi lebih cepat. Pemerataan informasi dan komunikasi diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, politik, dan kesejahteraan rakyat. Pemerataan informasi dan komunikasi saat ini paling efektif dilakukan dengan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat dan efisien (Khoirunnisa & Budiart, 2017).

Sebesar 20,28 persen responden berpendapat sangat tidak setuju bila masih terdapat keterbatasan dalam mengakses informasi. Kemudian, 71 orang juga berpendapat tidak setuju atas hal yang sama. Namun, terdapat

23,04 persen menyatakan bahwa masih memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi. Diperkuat oleh 15 orang yang berpendapat sangat setuju bahwa masih terbatas dalam mengakses informasi. Dari hasil kuisisioner tersebut, responden yang memiliki keterbatasan informasi bertempat tinggal jauh dari pusat kota. Meskipun teknologi dan dukungan internet cukup memadai, namun kualitas informasi yang didapatkan tidak terbuka bila dekat dengan perkotaan.

Gambar 4.12 Terbatasnya Akses Informasi



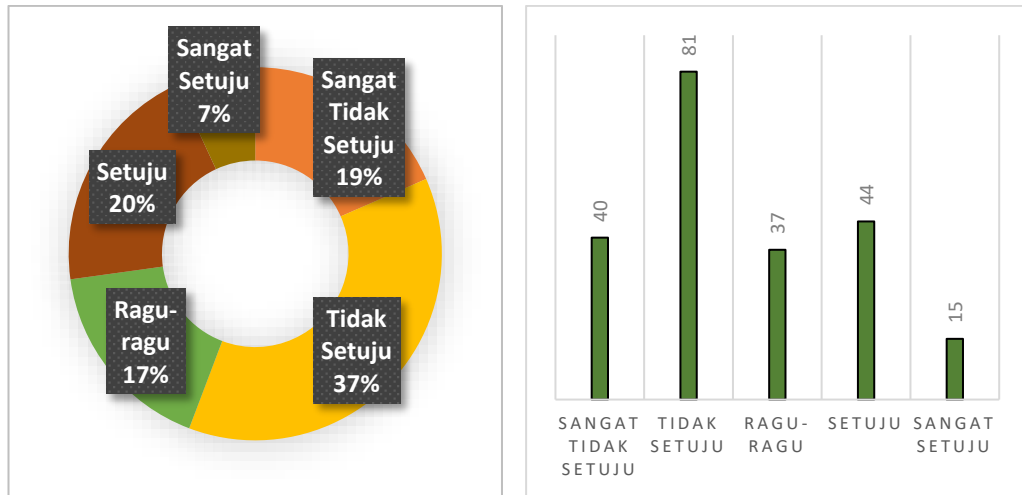
Sumber: Data Diolah, 2023

Transportasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian. Dengan dibangunnya sarana transportasi, akan menyediakan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari. Sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan mempermudah akses terhadap informasi, pasar, dan jasa masyarakat, serta lokasi tertentu. Akhirnya dengan adanya transportasi akan membuka peluang baru bagi berbagai aspek yang mendukung produktivitas dan kegiatan masyarakat. Selain itu,

akses transportasi yang mudah akan meningkatkan interaksi antar penduduk lokal dengan dunia luar. Jaringan transportasi menjadi komplementaritas dalam sektor lain. Ketika pembangunan tidak memperhatikan sektor transportasi maka transferabilitas antar daerah kurang berhasil. Atas hal tersebut, terbatasnya transportasi akan memberikan dampak yang cukup besar dalam kegiatan masyarakat seperti distribusi barang dan jasa terhambat, lamanya perjalanan ke akses pendidikan dan kesehatan, serta memperpanjang waktu tempuh.

Bagi 121 responden yang terdiri dari 81 (37,33 persen) orang menjawab tidak setuju dan 40 (18,43 persen) menjawab sangat tidak setuju, tidak setuju bahwa mereka terhambat dalam mengakses transportasi. Kemudahan dalam memilih jenis transportasi didapatkan responden dengan mudah. Sedangkan 20,28 persen responden lainnya masih terkendala dalam mengakses transportasi. Diperkuat oleh 15 orang lainnya yang memilih sangat setuju bahwa masih terbatasnya akses terhadap transportasi. Sisanya sebesar 17,05 persen menjawab ragu-ragu atas keterbatasan mengakses transportasi. Wilayah penelitian merupakan daerah yang jauh dari pusat kota, dimana akses terhadap wilayah lain masih jauh dan jarang dilalui oleh moda transportasi umum seperti bus. Sehingga, akses terhadap transportasi umum sulit untuk didapatkan. Alhasil, harus menunggu travel ataupun menggunakan kendaraan pribadi.

Gambar 4.13 Terbatasnya Akses Transportasi



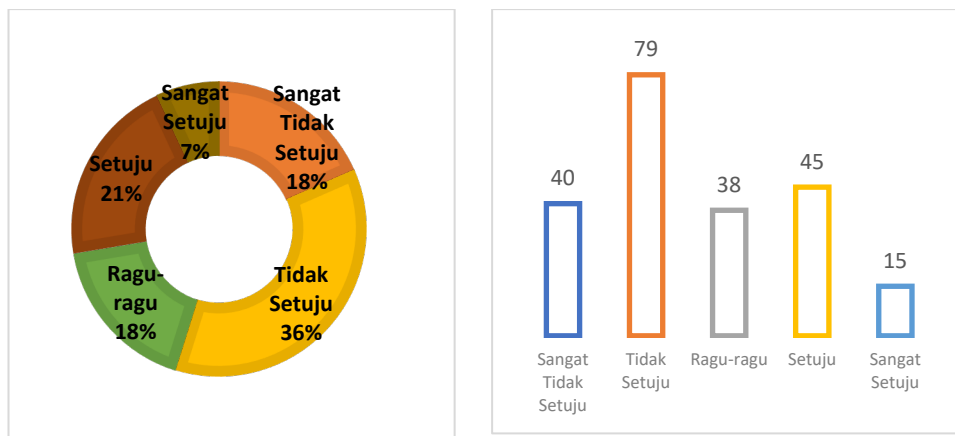
Sumber: Data Diolah, 2023

Terbatasnya akses sosial menghambat interaksi antar individu dalam masyarakat yang memunculkan kesenjangan si kaya dan si miskin, baik informasi, partisipasi, dan struktur sosial. Sehingga muncul inklusi sosial yang berhubungan erat dengan penanganan dan pengurangan kemiskinan. Inklusi sosial merupakan sebuah proses dalam masyarakat yang mencoba memperbaiki pola relasional antar individu dan kelompok, termasuk memperbaiki kemampuan dan kesempatan secara merata untuk mengakses berbagai macam kekayaan alam. Aspek dalam inklusi sosial meliputi partisipasi dalam perumusan kebijakan, akses layanan publik, akses pekerjaan dan sumber daya ekonomi, dan integrasi sosial dalam masyarakat (Hart, 2020).

Terbatasnya akses sosial dibenarkan oleh 60 responden dengan 20,74 persen menyatakan setuju dan sisanya menyatakan sangat setuju. Artinya terdapat 27,6 persen responden masih memiliki keterbatasan dalam akses sosial. Hal tersebut sesuai dengan latar belakang responden yang

masih berumur 20-an tahun yangmana usia tersebut masih tergolong muda dan produktif. Sehingga kepemilikan modal sosail masih minim dan masih dalam proses penyatuan dengan lingkungan sosial. Sementara itu, 36,41 persen responden merasa tidak setuju bahwa terdapat keterbatasan dalam akses sosial. Lain halnya dengan 40 responden yang menyatakan bahwa akses sosial tidak memiliki kendala apapun. Sisanya, beranggapan bahwa masih ada batasan sosial untuk hal-hal tertentu seperti partisipasi dalam pengambilan kebijakan, namun juga tidak mendapat batasan untuk hal lainnya seperti mendapatkan bantuan pemerintah.

Gambar 4.14 Terbatasnya Akses Sosial

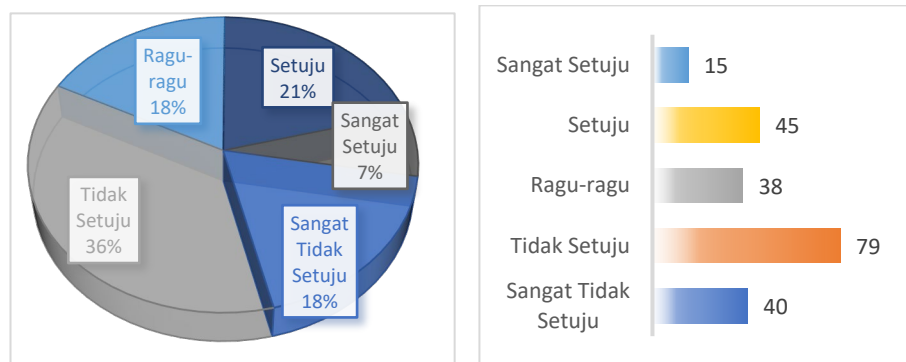


Sumber: Data Diolah, 2023

Ketika kesempatan berusaha terbatas, orang mungkin tidak memiliki akses ke pasar yang cukup besar untuk memperoleh pendapatan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, jika sumber daya ekonomi strategis seperti tanah, air, bahkan bahan baku industri dimiliki oleh segelintir orang atau perusahaan, maka orang-orang yang tidak memiliki akses ke sumber daya tersebut tidak akan dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan pendapatan yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan

ketidaksetaraan dalam mengakses sumber daya dan kesempatan ekonomi. Sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan kemiskinan.

Gambar 4.15 Terbatasnya Kesempatan Berusaha dan Kepemilikan Sumber Ekonomi Strategis



Sumber: Data Diolah, 2023

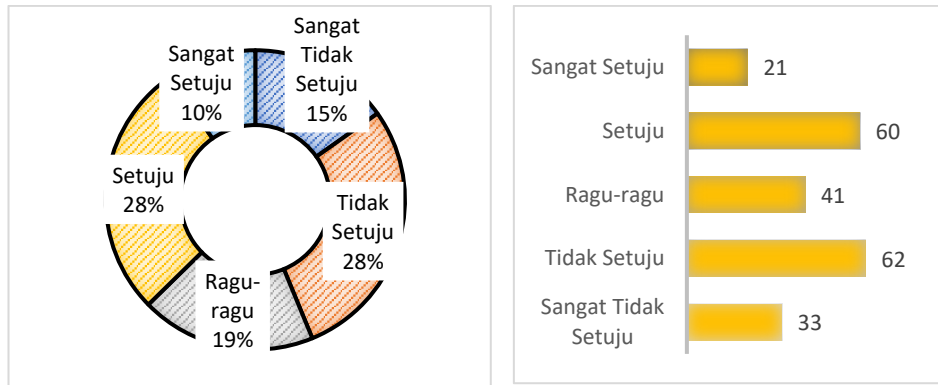
Terkait hal tersebut, 36,41 persen responden menjawab tidak setuju bahwa masih terdapat keterbatasan kesempatan berusaha dan kepemilikan sumber ekonomi strategis. Sejalan dengan hal tersebut, 40 orang memperkuat pernyataan tersebut. Artinya bahwa responden memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan usaha dan mengakses sumber ekonomi strategis. Meskipun demikian, masih terdapat 27,6 persen yang menyatakan bahwa masih memiliki keterbatasan akses untuk sumber ekonomi strategis.

Fay & Walton (2005), menyebutkan bahwa terbatasnya akses pelayanan pemerintah dapat berkontribusi terhadap kemiskinan. Rumah tangga miskin lebih memiliki akses yang terbatas terhadap layanan publik seperti air, sanitasi, dan kesehatan. Hambatan lainnya yaitu sulit dalam mengakses pendidikan dan layanan publik lainnya. Akibatnya rumah tangga

miskin sering terkendala dalam mencapai kemajuan ekonomi dan terus berjuang melawan kemiskinan. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat dan untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Akses terhadap pelayanan pemerintah menjadi masalah bagi responden. Terbukti sebanyak 122 responden berpendapat setuju dan sangat setuju serta ragu-ragu terhadap terbatasnya akses pelayanan pemerintah. Artinya bahwa 81 orang sangat kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan pemerintah secara keseluruhan, sedangkan 41 responden masih dapat mengakses pelayanan pemerintah untuk beberapa pemerintahan. Namun membutuhkan waktu cukup lama dalam mengaksesnya. Kemudian, bagi 95 responden lainnya, tidak ada kendala dalam akses terhadap pelayanan pemerintah. Hal ini dikarenakan ke 95 responden tersebut cukup bermukim di daerah yang dekat dengan pemerintahan setempat ataupun memiliki akses mudah seperti jalan dan transportasi guna mendapatkan pelayanan pemerintah. Dari 95 responden, 28,57 persen menyatakan tidak setuju dan 15,21 persen menyatakan sangat tidak setuju bahwa masih memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan pemerintahan.

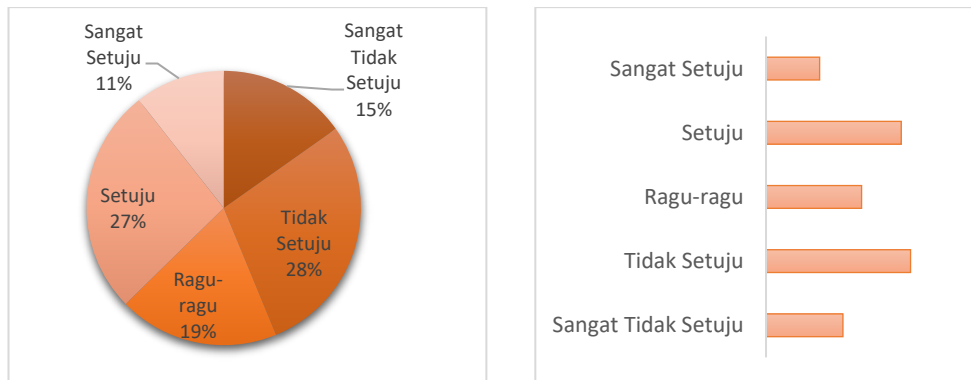
Gambar 4.16 Terbatasnya Akses Pelayanan Pemerintahan



Sumber: Data Diolah, 2023

Terbatasnya partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik sejatinya ada hubungan dengan kemiskinan melalui dua hal. *Pertama*, ketika partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik rendah, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif masyarakat miskin. Padahal partisipasi tersebut dapat berpengaruh terhadap alokasi sumber daya publik berupa program dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. *Kedua*, ketika masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai ke layanan publik, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Seharusnya, partisipasi dalam pemerintahan dapat mempengaruhi kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dari dua hal tersebut penting dan perlu mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan menjamin bahwa kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan dan perspektif masyarakat yang tergolong miskin.

Gambar 4.17 Terbatasnya Tingkat Partisipasi dalam Pemerintahan dan Pengambilan Keputusan Publik



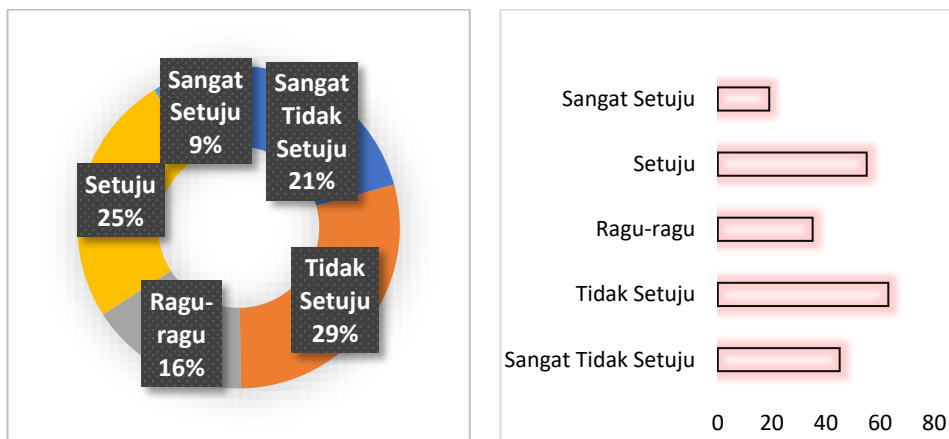
Sumber: Data Diolah, 2023

Dari 217 responden, 28,57 persen menyatakan tidak setuju bahwa masih terdapat keterbatasan dalam berpartisipasi terhadap pemerintah. Namun, 26,73 persen responden menyatakan bahwa setuju masih adanya keterbatasan dalam berpartisipasi. Hal ini mengindikasikan bahwa antara responden yang memiliki akses dan tidak sangat berbeda tipis. Perlu diperkuat bahwa 23 responden menyatakan sangat setuju bahwa tingkat partisipasi dalam pemerintah dan pengambilan keputusan publik masih terbatas dan tidak berorientasi untuk perspektif masyarakat yang tergolong miskin. Disisi lain, 33 orang menyatakan sangat tidak setuju bahwa akses partisipasi masih memiliki batasan. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responden pada umumnya sudah ikut serta dalam partisipasi terhadap pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa pengambilan keputusan publik bisa jadi tidak melibatkan merka, karena kembali kepengambil kebijakan yaitu pemerintah sendiri.

Kecenderungan masyarakat miskin memiliki perasaan kurangnya rasa aman atau ketidakamanan dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu *pertama*, ekonomi yang tidak aman akan menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam hidup baik perorangan maupun rumah tangga. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan mereka dalam merencanakan masa depan dan membuat keputusan finansial yang teoat. *Kedua*, kondisi sosial dan lingkungan sekitar yang tidak aman akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental dengan adanya peningkatan risiko penyakit, cedera, bahkan stres sehingga mengganggu kemampuan individu untuk bekerja dan mempertahankan penghasilannya. *Ketiga*, kurangnya rasa aman dapat membuat seseorang lebih apatis terhadap kemiskinan, karena perasaan tidak dapat mengubah kondisi mereka. Hal tersebut menghambat partisipasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.

Kurangnya rasa aman dalam kriteria kemiskinan ada tiga yaitu rasa takut, curiga, dan apatis. 35 responden menjawab ragu-ragu artinya bahwa responden memiliki salah satu atau lebih dari tiga hal yang termasuk dalam kurangnya rasa aman. Pada pertanyaan tersebut, responden cenderung memilih bahwa rasa aman sudah mereka miliki dengan 63 orang menjawab tidak setuju dan 20,74 persen menjawab sangat tidak setuju. Namun, masih banyak responden yang memiliki rasa kurang aman atas tiga hal didalamnya. 55 responden berpendapat bahwa mereka kurang memiliki rasa aman, yang diperkuat oleh 19 responden lainnya yang menyatakan sangat setuju bahwa mereka memang kurang memiliki rasa aman.

Gambar 4.18 Kurangnya Rasa Aman



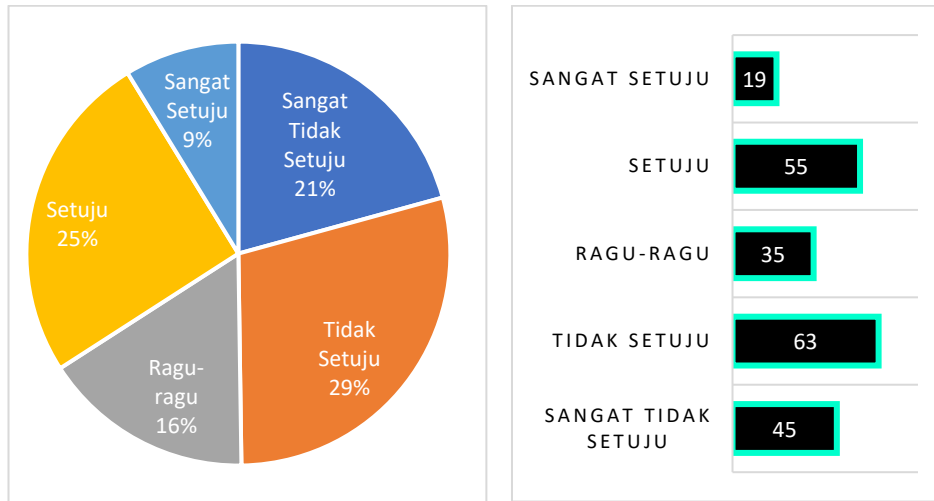
Sumber: Data Diolah, 2023

Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri. Sehingga menghambat kemampuan individu untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru yang dapat mengurangi kemampuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kurangnya rasa percaya diri nyatanya menghambat dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang harusnya memberikan kesempatan bagi mereka. Selain itu, kesehatan mental juga menjadi akibat dari kurangnya rasa percaya diri, karena mereka rentan terhadap stres dan depresi. Kemudian, bagi orang yang kurang percaya diri akan mengalami kesulitan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat, yang dapat mendukung sosial dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Secara umum, responden telah memiliki rasa percaya diri yang cukup baik. Dari 217 responden, terdapat 49,7 persen menyatakan bahwa mereka memiliki rasa percaya diri. 25,35 persen belum memiliki rasa percaya diri dan 19 responden sangat kurang memiliki rasa percaya diri.

Sisanya, masih ragu-ragu dalam menentukan dirinya dalam kondisi percaya diri ataupun kurang percaya diri.

Gambar 4.19 Kurangnya Rasa Percaya Diri



Sumber: Data Diolah, 2023

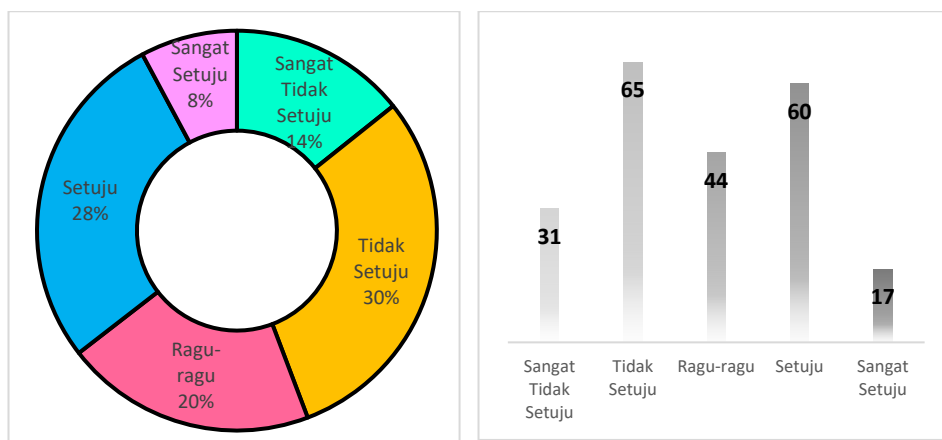
Terbatasnya kemampuan untuk memanfaatkan waktu luang menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan, ketika seseorang tidak memanfaatkan waktu luang untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan tambahan maka cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama jika individu tersebut tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang cukup, maka peluang terjadinya kemiskinan semakin tinggi. Selain itu, kurangnya kemampuan memanfaatkan waktu luang dapat berpengaruh terhadap pendidikan atau pelatihan guna meningkatkan kualitas diri.

Responden setuju bahwa mereka kurang memanfaatkan waktu luang dengan persentase sebesar 27,65 persen. Kemudian responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 7,82 persen. Sementara itu, responden

yang berhasil memanfaatkan waktu luang sebanyak 14,29 persen ditambah dengan yang merasa tidak setuju bahwa masih terbatasnya kemampuan memanfaatkan waktu luang sebanyak 65 orang. Lain halnya dengan 44 responden lainnya yang menyatakan ragu-ragu bahwa mereka mampu untuk memanfaatkan waktu luang.

Gambar 4.20 Terbatasnya Kemampuan untuk Memanfaatkan Waktu

Luang

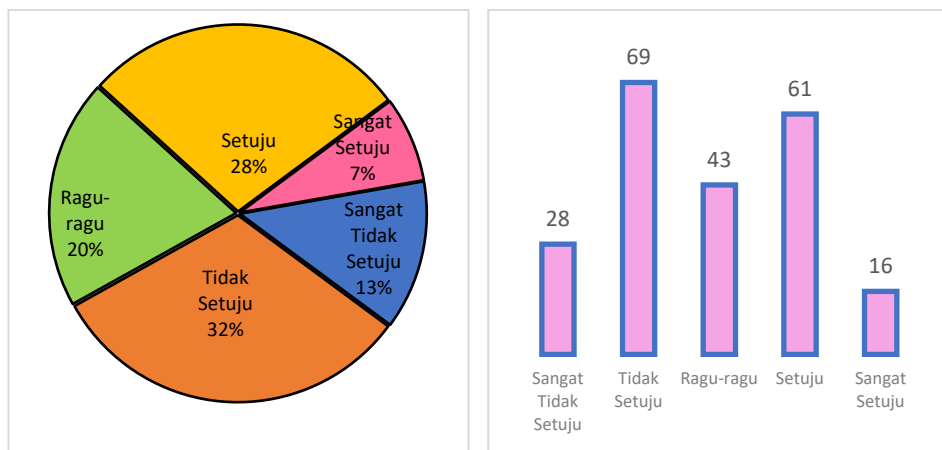


Sumber: Data Diolah, 2023

Konflik sosial dan masalah sosial dapat mempengaruhi akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan. Ketidakadilan dan diskriminasi juga dapat menghambat akses ke sumber daya dan peluang. Orang yang mengalami diskriminasi ras, gender, atau kelas sosial, misalnya, dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, atau kesempatan kerja yang layak. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, resolusi konflik dan masalah sosial adalah penting untuk mengatasi

kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan ekonomi dapat membantu mengatasi akar masalah kemiskinan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan layanan dasar yang lebih baik serta penguatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja dapat membantu individu untuk memperoleh sumber daya dan peluang yang mereka butuhkan untuk keluar dari kemiskinan.

Gambar 4.21 Terbatasnya Kemampuan Resolusi Konflik dan Masalah Sosial



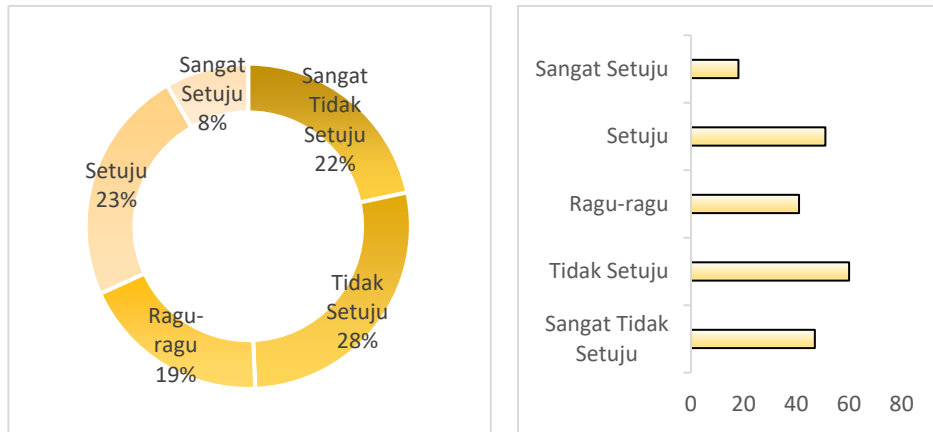
Sumber: Data Dilah, 2023

28,11 persen responden setuju bahwa masih ada keterbatasan dalam resolusi konflik dan masalah sosial. Didukung oleh 16 pernyataan responden yaitu sangat setuju atas keterbatasan tersebut. namun, dari 217 responden, 69 justru merasa tidak ada keterbatasan dalam resolusi konflik dan masalah sosial, juga 12,90 responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa masih ada keterbatasan untuk hal tersebut. Sehingga, secara umum responden menyatakan tidak setuju bila masih ada batasan dalam resolusi konflik dan masalah sosial.

Lingkungan yang buruk juga dapat memperburuk kemiskinan, terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, pencemaran lingkungan dapat merusak sumber daya alam dan lingkungan yang penting bagi mata pencaharian dan kehidupan masyarakat miskin, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dengan demikian, kualitas lingkungan yang buruk dapat memperburuk kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, investasi dalam lingkungan yang bersih dan sehat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan air yang baik, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan dapat menjadi bagian integral dari strategi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Hampir 50 persen responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa kualitas lingkungan sekitar mereka tergolong kedalam kualitas yang buruk, baik secara kesehatan maupun secara sosial. Disusul oleh 51 responden menyatakan setuju bahwa lingkungan sekitar mereka masih tergolong buruk dengan polusi diberbagai aspek. Ditambah dengan 8,29 persen responden memberikan pernyataan sangat setuju bahwa masih buruknya kualitas lingkungan disekitar mereka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan yang baik masih terdapat aspek yang buruk dan sebaliknya dengan dukungan pernyataan dari 18,89 responden.

Gambar 4.22 Buruknya Kualitas Lingkungan



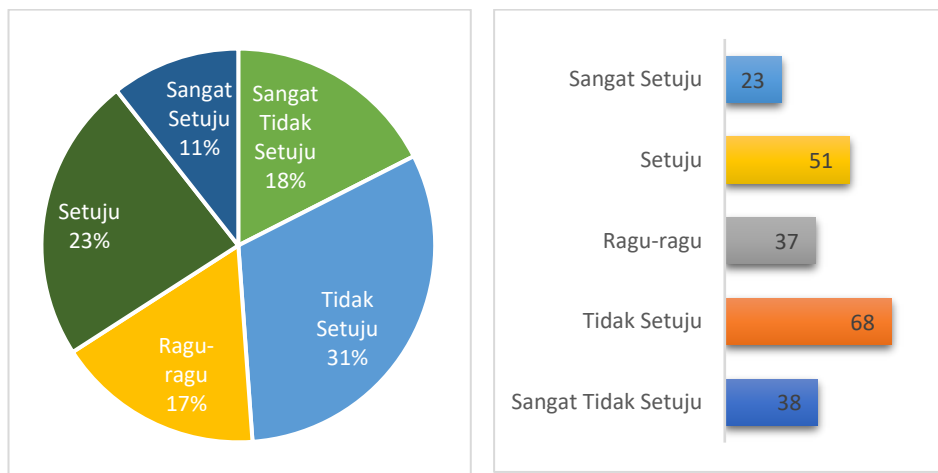
Sumber: Data Diolah, 2023

Disiplin masyarakat bisa memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Tingkat disiplin yang tinggi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan produktif, sehingga menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai contoh, jika masyarakat disiplin dalam mematuhi aturan dan hukum, maka pemerintah dapat lebih mudah memaksimalkan sumber daya dan menciptakan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika masyarakat kurang disiplin, maka peluang ekonomi dapat menjadi terbatas dan kemiskinan dapat meningkat. Namun, penting juga diingat bahwa faktor lain seperti kurangnya akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur juga dapat memainkan peran dalam memperburuk kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi kemiskinan harus melibatkan berbagai faktor dan harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Responden memberikan jawaban terkait rendahnya tingkat disiplin masyarakat yaitu sebesar 23,50 persen menyatakan setuju. Sedangkan 31,34

persen tidak setuju atas pertanyaan tersebut. 23 responden menjawab sangat setuju bahwa masyarakat memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Namun, 38 responden menyatakan sebaliknya bahwa tingkat disiplin masyarakat cukup baik. Sisanya, sebanyak 37 responden menjawab ragu-ragu terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah.

Gambar 4.23 Rendahnya Tingkat Disiplin Masyarakat



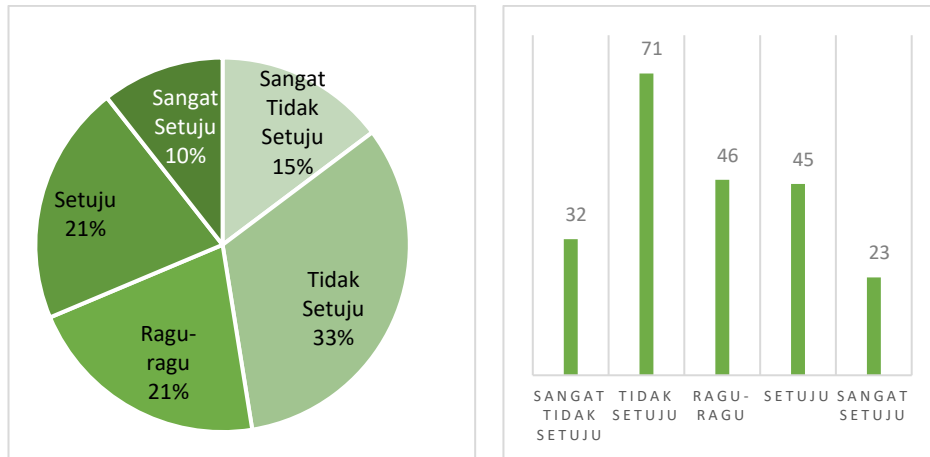
Sumber: Data Diolah, 2023

Rendahnya etos kerja masyarakat juga bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya kemiskinan. Etos kerja mengacu pada sikap positif dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang terhadap pekerjaannya, yang biasanya melibatkan keinginan untuk bekerja keras dan mencapai kesuksesan. Jika masyarakat memiliki etos kerja yang rendah, mereka mungkin cenderung tidak memiliki motivasi untuk bekerja keras dan memperjuangkan keberhasilan dalam karir mereka. Hal ini bisa menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, sehingga menyebabkan kemiskinan. Selain itu, rendahnya etos kerja juga bisa menyebabkan masyarakat mengandalkan bantuan pemerintah atau program

kesejahteraan sosial lainnya, bukan mengembangkan keterampilan dan usaha sendiri untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Ini bisa menjadi siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Namun, penting juga diingat bahwa rendahnya etos kerja tidak selalu menjadi penyebab langsung dari kemiskinan. Ada banyak faktor kompleks terkait dengan kemiskinan, termasuk kurangnya akses ke pendidikan, pekerjaan yang tidak stabil, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, solusi yang holistik dan terintegrasi diperlukan.

Rendahnya etos kerja disetujui oleh 20,74 responden dengan jawaban setuju dan 23 responden dengan jawaban sangat setuju. Kebalikannya, sebanyak 71 responden tidak setuju bahwa etos kerja masih tergolong rendah. Diperkuat oleh 14,75 persen responden dengan jawaban sangat tidak setuju bahwa etos kerja masih rendah. Lainnya, sebanyak 46 responden menjawab ragu-ragu bahwa etos kerja masih rendah. Namun, secara keseluruhan responden tidak setuju bahwa etos kerja yang mereka miliki masih rendah. Beberapa yang menjawab etos kerja rendah cenderung belum memiliki pekerjaan atau sedang menempuh pendidikan.

Gambar 4.24 Rendahnya Etos Kerja

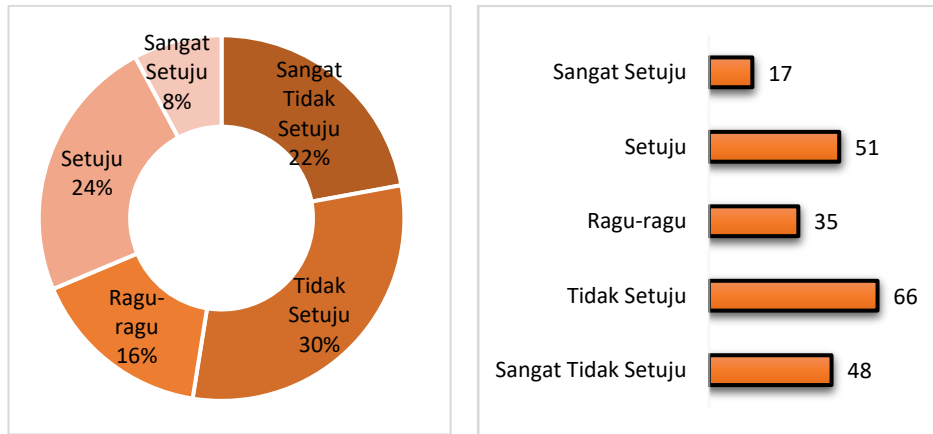


Sumber: Data Diolah, 2023

Menabung dan berinvestasi dapat membantu mengatasi kemiskinan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, menabung dan berinvestasi dapat membantu mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Dengan memiliki dana yang cukup, seseorang dapat menghindari terjatuh dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk diubah. Secara tidak langsung, menabung dan berinvestasi dapat membantu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan menabung dan berinvestasi, seseorang dapat memperoleh bunga atau keuntungan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi finansialnya. Selain itu, dengan menabung dan berinvestasi, seseorang juga dapat mengurangi risiko mengalami kerugian finansial yang dapat memperparah kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, kurang suka menabung atau berinvestasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan, terutama jika seseorang tidak memiliki sumber pendapatan lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun demikian, saya juga memahami bahwa

menabung dan berinvestasi dapat sulit dilakukan bagi orang yang kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk melakukannya.

Gambar 4.25 Kurang Suka Menabung atau Berinvestasi



Sumber: Data Diolah, 2023

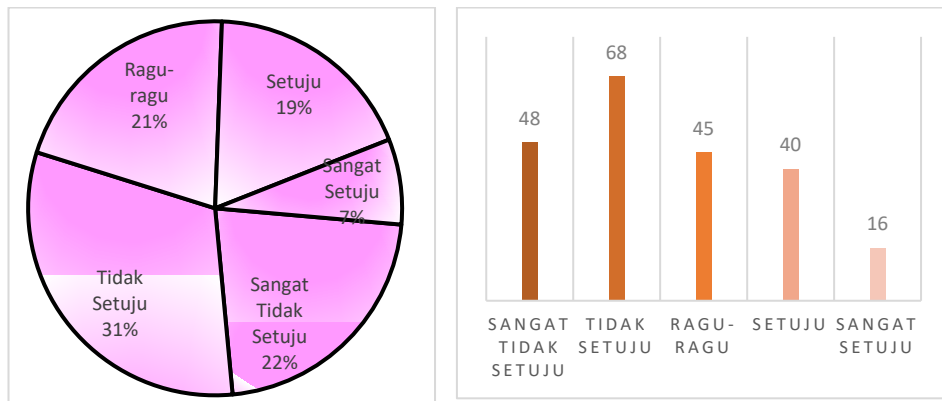
Kurang suka menabung atau investasi tidak disetujui oleh 30,41 responden dan sangat tidak disetujui oleh 48 responden lainnya. Artinya bahwa lebih dari 50 persen responden sudah memiliki kesadaran untuk mengalokasikan pendapatannya untuk menabung atau berinvestasi. Namun masih terdapat 51 orang atau sekitar 23,50 persen responden yang belum memiliki kesadaran menabung dengan menjawab setuju terhadap pernyataan tersebut. Bahkan 17 responden lainnya menyatakan sangat setuju bahwa mereka masih kurang dalam menabung atau berinvestasi. Sisanya sebesar 16,13 persen menyatakan bahwa menabung atau berinvestasi tergantung pada pendapatan yang diterima. Sehingga menjawab ragu-ragu atas pertanyaan tersebut.

Kurangnya berorientasi ke masa depan dapat meningkatkan risiko terjadinya kemiskinan karena seseorang cenderung tidak mempersiapkan

diri secara finansial untuk menghadapi masa depan. Tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan yang diambil hari ini, seseorang mungkin mengambil keputusan yang tidak bijaksana dan berdampak negatif pada kondisi keuangan di masa depan. Misalnya, seseorang yang kurang berorientasi ke masa depan mungkin tidak memperhatikan pentingnya menabung untuk mempersiapkan dana darurat. Ketika tiba-tiba mengalami keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, orang tersebut mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi situasi tersebut.

Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjatuh dalam kemiskinan karena harus bergantung pada pinjaman yang memerlukan pembayaran bunga tinggi. Di sisi lain, seseorang yang memiliki orientasi ke masa depan cenderung mempersiapkan diri secara finansial untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan menabung dan berinvestasi, seseorang dapat membangun dana darurat yang dapat digunakan untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Selain itu, dengan memperhatikan kebutuhan masa depan, seseorang juga dapat merencanakan pengeluarannya dengan lebih baik dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Oleh karena itu, orientasi ke masa depan dapat membantu mencegah terjadinya kemiskinan dengan mempersiapkan diri secara finansial dan mengurangi risiko mengalami kerugian finansial di masa depan. Namun, disisi lain juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri secara finansial.

Gambar 4.26 Kurang Berorientasi ke Masa Depan



Sumber: Data Diolah, 2023

Lebih dari 50 persen responden menjawab tidak setuju atas pertanyaan kurang berorientasi ke masa depan. Secara spesifik, 68 orang atau 31,34 persen responden menjawab tidak setuju dan 22,12 persen atau 48 orang responden menjawab sangat tidak setuju atas pernyataan tersebut. Artinya bahwa sudah ada rencana yang berorientasi terhadap masa depan seperti finansial, pendidikan, dan jaminan kesehatan. Namun, masih terdapat 18,43 persen atau 40 orang responden yang menjawab setuju atas pernyataan tersebut. Terlebih lagi, terdapat 16 orang atau 7,37 persen dari responden yang sangat setuju atas pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa 56 orang responden tersebut belum memiliki orientasi masa depan yang direncanakan, baik dari segi finansial, kesehatan, maupun pendidikan. Sedangkan, 45 orang sisanya menyatakan ragu-ragu bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk masa depan.

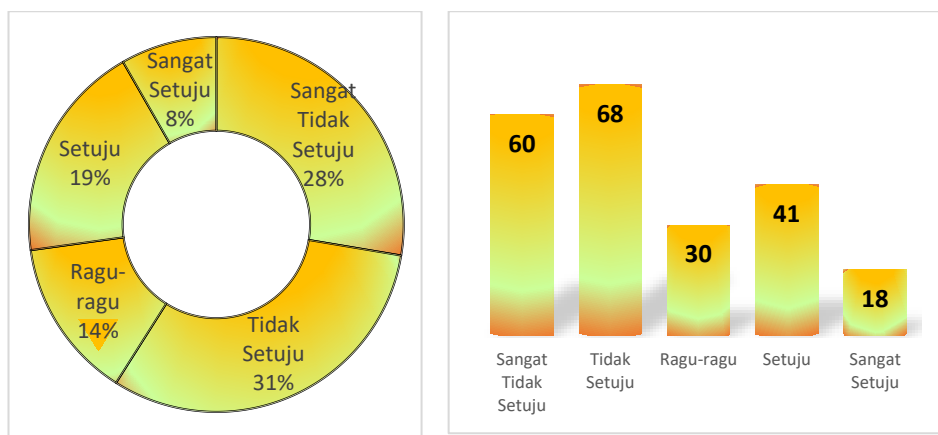
Sikap nrimo atau pasrah pada takdir dan mudah menyerah terhadap nasib memang dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan pada seseorang. Jika seseorang memiliki sikap yang pasrah terhadap takdir atau nasib, maka

dia mungkin tidak akan berusaha untuk memperbaiki keadaannya atau mengubah situasinya yang mungkin menyebabkan kemiskinan. Sebaliknya, dia mungkin akan menganggap bahwa kemiskinan adalah nasibnya dan harus diterima. Sikap tersebut dapat menghambat seseorang untuk mencari peluang atau solusi untuk mengatasi kemiskinan. Seseorang yang memiliki sikap seperti ini mungkin tidak akan berusaha untuk mencari peluang atau mengambil risiko yang diperlukan untuk meningkatkan kondisinya. Namun, perlu diingat bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya, seperti faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, meskipun sikap nrimo dan mudah menyerah pada nasib atau takdir dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, tetapi hal itu tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya penyebab kemiskinan.

Menurut responden, sikap nrimo dan mudah menyerah pada nasib atau takdir tidak dapat diterima. Terlihat bahwa hampir 60 persen responden menolak pernyataan tersebut. sebanyak 68 orang berpendapat tidak setuju dan 60 orang berpendapat sangat tidak setuju atas pernyataan tersebut. sedangkan 18,89 persen responden setuju dan 18 orang menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Artinya bahwa sudah ada kesadaran dan keterbukaan dikalangan responden terhadap sikap nrimo dan mudah menyerah pada takdir. Responden berpendapat bahwa sikap menyerah pada nasib atau takdir tidak dapat diterima karena ketentuan tersebut masih bisa dirubah dengan berbagai cara seperti meningkatkan kualitas diri dari segi pendidikan, kesehatan, dan kesempatan bekerja. Sementara, bagi responden

yang menyatakan setuju bahkan sangat setuju dikarenakan belum optimal akses yang didapatkan untuk mengubah pola pikir tersebut. Dari tingkat pendidikan, pengalaman, lingkungan sosial, pendapatan, dan lain-lain. Sehingga, keterbukaan informasi, akses, dan pengetahuan dapat merubah pola pikir tersebut dan menjadikan motivasi dalam memperbaiki keadaannya.

Gambar 4.27 Sikap Nrimo dan Mudah Menyerah Pada Nasib atau Takdir



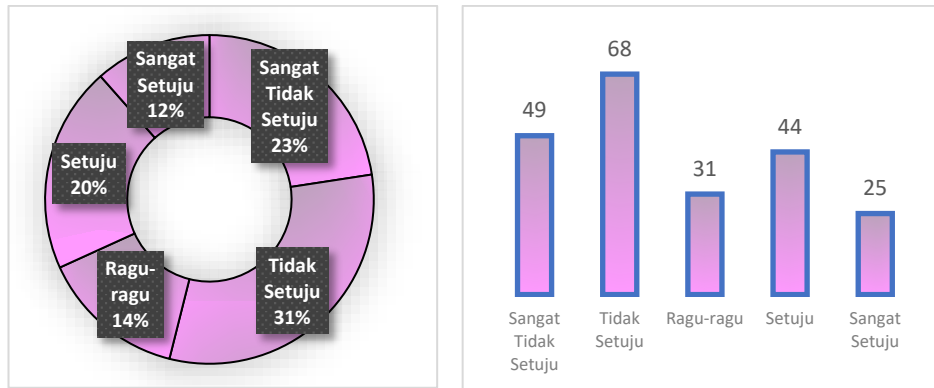
Sumber: Data Diolah, 2023

Sikap ketergantungan juga dapat berpengaruh pada terjadinya kemiskinan pada seseorang. Jika seseorang memiliki sikap ketergantungan yang tinggi, maka dia mungkin tidak akan berusaha untuk mandiri atau memperbaiki kondisinya sendiri. Dia mungkin mengandalkan bantuan dari orang lain atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap ketergantungan yang tinggi juga dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup. Sebagai contoh, jika seseorang selalu mengandalkan bantuan sosial, maka dia mungkin tidak akan berusaha untuk mencari pekerjaan atau peluang usaha

yang dapat meningkatkan pendapatannya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kemiskinan disebabkan oleh sikap ketergantungan, seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, serta diskriminasi. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan, termasuk memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran, menciptakan peluang kerja dan pelatihan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.

Secara umum, responden menyadari bahwa sikap tergantung kepada orang lain atau pemerintah merupakan sikap yang tidak etis dimiliki. Terlihat sebanyak 117 responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju atas pernyataan tersebut dengan rincian 31,34 persen menyatakan tidak setuju dan 49 orang menyatakan sangat tidak setuju. Kemudian, sebanyak 44 orang menyatakan setuju bahwa mereka masih memiliki sikap ketergantungan terhadap orang lain. Diperkuat oleh 11,52 persen responden lainnya yang menyatakan bahwa sangat setuju bahwa mereka masih memiliki sikap tergantung kepada orang lain. Hal ini tidak baik bagi seseorang mengingat bahwa kemandirian diperlukan guna mengukur sejauh mana mereka dapat mengupayakan kehidupan yang sejahtera bagi dirinya sendiri. Sementara itu, 31 responden menjawab ragu-ragu terhadap sikap tergantung tersebut. Artinya bahwa mereka terkadang masih memiliki sikap tergantung, namun disisi lain masih memiliki sikap mandiri.

Gambar 4.28 Sikap Ketergantungan



Sumber: Data Diolah, 2023

4.5 Persebaran Keluarga Miskin Berdasarkan Sistem Informasi Geografis

Berdasarkan hasil pengolahan data responden, kemudian dilakukan pemetaan terhadap data tersebut untuk mengetahui persebaran keluarga miskin berdasarkan wilayahnya menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Pemetaan ini dilakukan guna mengetahui wilayah mana yang paling banyak terdapat keluarga miskin. Persebaran dari profil keluarga miskin terbagi menjadi tiga kelompok katagori, yaitu miskin yang dinotasikan dengan warna merah, kaya yang dinotasikan dengan warna hijau, dan middle-poor atau keluarga dengan ekonomi sedang dinotasikan dengan warna kuning.

Ketiga katagori tersebut kemudian diaplikasikan kedalam GIS hingga menghasilkan seperti gambar di bawah ini. Gambar 4.6.1 menunjukkan persebaran responden berdasarkan katagorinya. Terlihat bahwa Kecamatan Rambah memiliki variasi katagori kemiskinan sekaligus menunjukkan bahwa terdapat banyak responden yang bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Kelompok dengan katagori middle-poor mendominasi dengan lebih dari 50

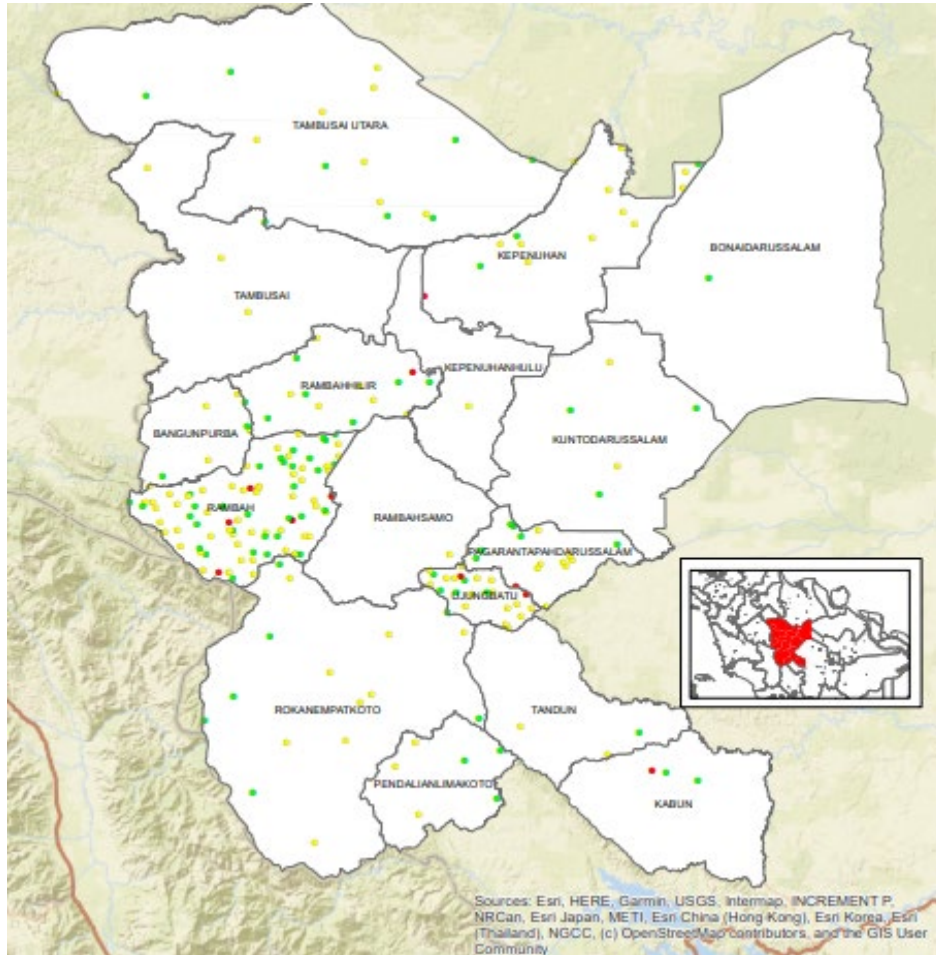
persen, disusul oleh kelompok kaya. Sedangkan, pada katagori miskin, hanya terdapat 5 responden yang berasal dari Kecamatan Rambah.

Kecamatan lainnya yang juga cukup mendominasi yaitu Kepenuhan yang hanya memiliki 1 keluarga dengan katagori miskin dan 3 keluarga dengan katagori kaya, serta sisanya berada dalam katagori middle-poor. Kecamatan Ujung Batu dengan wilayah yang kecil namun terdapat cukup banyak keluarga yang tergolong dalam middle-poor. Sama halnya dengan kecamatan sebelumnya, Ujung Batu memiliki kelompok masyarakat miskin sebanyak 3 keluarga dan kelompok keluarga kaya sebanyak 6 keluarga. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di kecamatan tersebut sejatinya sudah baik dengan distribusi pendapatan yang cukup merata.

Wilayah lainnya yang cukup mewakili asal responden yaitu Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Rokan Empat Koto, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Pagar Antapah Darussalam, Kecamatan Tandun, dan Kecamatan Pendalian Limo Kato. Tujuh kecamatan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat keluarga dengan katagori miskin yang menjadi responden. Adapun katagori keluarga untuk ke-7 kecamatan tersebut masuk dalam katagori middle-poor dan kaya. Artinya bahwa distribusi pendapatan dari kecamatan tersebut sudah merata.

Adapun persebaran di Kecamatan Bonai Darussalam menunjukkan hanya terdapat keluarga yang masuk dalam katagori kaya saja. Sedangkan untuk katagori middle-poor saja berada di Kecamatan Tambusai, Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Untuk Kecamatan Kabun

terdapat satu keluarga dengan katagori miskin dan dua keluarga dalam katagori kaya. Sedangkan, keluarga dengan katagori middle-poor tidak terdapat dikecamatan tersebut.



Gambar 4.6.1 Persebaran Keluarga Miskin Berdasarkan Katagori

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5 Kesimpulan

Kemiskinan menjadi masalah kompleks dan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, namun juga kegagalan untuk memenuhi kebutuhan hak dasar hidupnya. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan direspon oleh Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2004 yang sekaligus merespon Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial. Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple-track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun secara relatif tetapi secara nominal meningkat. Kedua, kerentanan kemiskinan yang mengarah pada banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan antar wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kesenjangan pendapatan atau konsumsi antar penduduk secara keseluruhan serta antar penduduk miskin atau dapat disebut sebagai indeks keparahan kemiskinan.

Dari 24 indikator untuk menyatakan kemiskinan, 217 responden telah memberikan jawaban sesuai dengan yang responden alami serta rasakan. 24 indikator tersebut menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Artinya bahwa secara pengelompokkan, lebih dari 50 persen responden tidak memiliki kriteria

kemiskinan berdasarkan 24 indikator tersebut. Namun, perlu dipahami bahwa masih ada responden yang termasuk kedalam 24 indikator tersebut. Jawaban yang diberikan dengan memilih setuju dan sangat setuju atas berbagai keterbatasan akses mengindikasikan bahwa responden termasuk dalam ciri-ciri masyarakat yang miskin. Sehingga perlu campur tangan berbagai pihak untuk lebih prefer ke berbagai kebijakan yang memberikan dampak terhadap responden atau masyarakat luas yang memiliki keterbatasan berbagai aspek tersebut.

1.3 Saran

Berdasarkan jawaban responden atas 24 pertanyaan yang diajukan serta kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan untuk responden dan pemerintah sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pengambil keputusan hendaknya melibatkan masyarakat dengan mendengarkan aspirasinya guna merumuskan kebijakan yang berorientasi pada seluruh lapisan masyarakat.
- b. Keterlibatan masyarakat sangat membantu bagi pemerintah dalam pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemerintah.
- c. Sebagai penyelenggara negara, hendaknya pemerintah memberikan kemudahan akses diberbagai aspek ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

- d. Peran pemerintah dan swasta dalam meningkatkan ketersediaan lapangan kerja sangat membantu pencari kerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup.
- e. Program pemerintah hendaknya menysasar keseluruhan lapisan masyarakat dengan orientasi khusus pada masyarakat miskin, sehingga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat melalui kesempatan dan kemudahan akses baik pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
- f. Bagi responden, hendaknya meningkatkan nilai tambah diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari program peningkatan sumber daya manusia.
- g. Responden perlu meningkatkan motivasi diri untuk keluar dari lingkungannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
- h. Meningkatkan faktor pendukung terhadap sumber ekonomi strategis menjadi salah satu jalan untuk keluar dari zona kemiskinan seperti meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan keterbukaan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, K. P. (2018). Analysis of Poverty Profile by Type of House of Households in Nepal. *Management Dynamics*.
- Akerele, D., & Adewuyi, S. (2011). Analysis of Poverty Profiles and Socioeconomic Determinants of Welfare among Urban Households of Ekiti State, Nigeria. *Current Research Journal of Social Sciences*, 1-7.
- Amin, A. M., Bahri, S., Setianingsih, R., & Ernawati. (2018). Analisis Perekmbangan Kondisi Kemiskinan di Provinsi Riau. *Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia*, (pp. 178-195). Riau.
- Anita, R. D. (2020). *Pengaruh Indikator Komposit Ketahanan Pangan Terhadap Konsumsi Pangan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Arrafiqur Rahman, I. E. (2020). Solusi Persoalan Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu. *Cano Ekonomos*.
- Bellante, D., & Jackson, M. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: FE UI.
- BPS, B. P. (2018). *adan Pusat Statistik*. Retrieved from Kecamatan Galesong Utara Dalam Angka 2018: <https://takalarkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/7e5d4feb748c38430d4907ae/kecamatan-galesong-utara-dalam-angka-2018.html>
- Hart, E. (2020). *Inklusi Sosial*. Kemitraan. Retrieved from <https://www.kemitraan.or.id/uploads/content/BUKU-INKLUSI-SOSIAL.pdf>
- Hermawati. (2011). *Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Januarisman, R. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kemiskinan di Kecamatan Kampar*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

- Khoirunnisa, & Budiart, W. (2017). Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG's* (pp. 759-768). Sekolah Tinggi Ilmu Statistika.
- Matos, L. A., Leal, E. M., Pontes, F. A., & Silva, S. S. (2021). Poverty and family resilience in Belém-Pará. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 1-12.
- Prasetya, A. D. (2016). *The Determinants of Households Poverty in Indonesia: Case Study of Individual in Household of Indonesia Family Survey (IFLS)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ritonga, H. (2003). *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Bapan Pusat Statistik.
- Rozanti, Y. D., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2021). Determinants of Household Poverty Status in Kediri City. *Journal of Indonesian Applied Economics*.
- Sa'diyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 1-11.
- Sekjen DPR RI. (2015). *Dimensi Kemiskinan*. Retrieved from [dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan20130130135844.pdf)
- Sjafari, A. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, U. (2021). *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Riau*. Retrieved from Cakaplah: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/72530/2021/07/22/ini-faktor-yang->

mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-di-
riau#sthash.EVI3BVED.spJ6MJIF.dpbs

Utomo, D. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri). *Administrasi Publik*, 2(1).

Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

**Ketua Peneliti
Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ir. Tri Kurniawati Retnaningsih, M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Agama	Islam
4	Pekerjaan	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
5	Jabatan Fungsional	Lektor
6	NIP	195903131986931002
7	NIDN	0013035902
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Bondowoso, 12 Maret 1959
9	E-mail	nuning@ecampus.ut.ac.id
10	Nomor Telepon/HP	082136989813

B. Riwayat Pendidikan

		S-1	S-2
C.	Nama Perguruan	Institut Pertanian Bogor	Universitas Indonesia
	Bidang Ilmu	Sosial Ekonomi	Pengkajian Ketahanan Nasional

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1	2023	Pemberdayaan Pelaku Usaha Kuliner Melalui Pembentukan Kelompok Usaha Bersama untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga
2	2023	Pengembangan Kewirausahaan Usaha Jagung Marning
3	2021	Meningkatkan Ketrampilan Berwirausaha Bagi Para Perintis Usaha
4	2018	IBM Pembuatan Gamis dan Kerudung Muslimah

D. Publikasi Artikel Ilmiah

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Does the use of mobile phones by farmers affect agricultural productiv it in Indonesia	IJEMBIS	Volume 3, Issue 1, January 2023

2	Dampak Sosial Ekonomi Bencana Banjir Dan Pemetaannya Berbasis Sistem Informasi Geografis	Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis	
---	--	---------------------------------	--

Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Heffi Christya Rahayu, M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Agama	Islam
4	Pekerjaan	Dosen Ekonomi Iniversitas Pasir Pengaraian
5	Jabatan Fungsional	Lektor
6	NIK/No. KTP	057 006 051/1406035806730003
7	NIDN	10 180673 03
8	Tempat dan Tanggal Lahir	P. Berandan, 18 Juni 1973
9	E-mail	heffirahayu@gmail.com
10	Nomor Telepon/HP	085274264044

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan	UII	UGM	UNS
Bidang Ilmu	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi Pembangunan	Ekonomi Pembangunan

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1	2013	Bimbingan Manajemen Usahan Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Di Desa Sialang Jaya
2	2013	Analisis Strategi Pemasaran Yang Mendorong Keberhasilan Usaha Baru (Studi Pada Usaha-usaha Di Lingkungan Universitas Pasir Pengaraian)
3	2013	Implementasi Gerakan Kader Karang Taruna Untuk Kedaulatan Ekonomi Di Desa Rambah Utama

D. Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Pengaruh Nilai Tanah Terhadap Lingkungan Kampus Politeknik Pasir Pengaraian	Aptek	Vol 1 No 1 Juli 2009
2	Analisis Kinerja ruas Jalan Tuanku Tambusai (Kumu) Pasir Pengaraian Pada Kondisi Puncak	Aptek	Vol 3 No 2 Juli 2011
3	Analisa Sektor-sektor Unggulan Wilayah Kabupaten Rokan Hulu	Prosiding	
4	Analisis Kinerja Ruas Jalan Muara Rumbai (Kumu) Pasir Pengaraian Pada Kondisi Puncak	Prosiding	Vol 3 No 2 Juli 2011
5	Pelaksanaan TI Pada Kualitas Layanan ADM Mahasiswa Di Kampus UPP	Cano Ekonomos	Vol 2 No 1 Januari 2013
6	Analisa Pendapatan Gula Aren Di Tanjung Belit	Cano Ekonomos	Vol 2 No 2 Juli 2013
7	Kontribusi Marketing Mix Terhadap Keputusan Mahasiswa SI Untuk Memilih Kuliah UPP	Cano Ekonomos	Vol 3 No 1 Januari 2014
8	Aspek Geografi dan Infrastruktur di Propinsi Riau	Proceeding International Conference	ISBN : 978-602-50627-0-4
9	Dimensions of Poverty in Coastal Areas In Indragiri Hulu Regency Riau Province	Jurnal Ekonomi Malaysia	Submit
10	Dimensi Kemiskinan di Wilayah Pesisir Pada Kabupaten Indragiri Hulu	Jurnal Organisasi Dan Manajemen. Universitas Terbuka	ISSN : 2442 - 9155 Vol.14 N0.1 2018
11	Geography and Infrastructure Dimension on Poverty in Riau Province- Data Panel Approach at the Village Level	Journal of Southwest Jiaotong University (Q2)	Letter of Acceptance for Publication No. 636/13.08.2019
12	The Impact of Infrastructure Development on Poverty Reduction in Indonesia	Prosiding ISBEST UT	Submit

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul /Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-----	--------------------------------	-----------------------	------------------

1	Pelatihan	Pendampingan Penyusunan Borang Akreditasi	Batam, 5 April 2012
2	Seminar	Perpajakan	Pekan Baru, 20 Juni 2012
3	Seminar	Teaching And Learning Strategies For EFL Students	UPP, 20 November 2012
4	Workshop	Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Menuju Akreditasi	Pekan Baru, 5-6 November 2012
5	Pelatihan	Penulisan Artikel Ilmiah Nasional	UPP, 27 November 2012
6	Loka Karya	Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian Ilmiah Dosen	UPP, 27-29 Desember 2012
7	Pelatihan	Pelatihan TI	UPP, 26 Februari 2013
8	Seminar	Sertifikasi Dosen, Penyusunan BKD Dan Kepangkatan	UPP, 27 Februari 2013
9	Bisnis Plan	Aspek Hukum Dalam Bisnis	UPP, 24 Maret 2013
10	Pelatihan	Pelatihan SPSS	UPP, 10 April 2013
11	Lokakarya	Penyusunan Proposal Pengabdian Masyarakat Hibah Dikti 2013	UPP, 23 April 2013
12	Workshop	Technical Assintance Dalam Mendesain Kurikulum Untuk Pencapaian Visi dan Misi Program Studi dan Fakultas	UPP, 3 Mei 2014
13	Seminar Internasional Pendidikan Kab. Rohul	Isu-isu Strategis Pendidikan Indonesia-Malaysia	Rokan Hulu, 4 Mei 2013
14	Bedah Buku	Ilmu Menjual	UPP, 30 Mei 2013
15	Pelatihan	Pelatihan KKNI	UPP, 23 Juni 2013
16	Workshop	Penjaminan Mutu Pada PT	UPP, 10-11 Juni 2013
17	Pelatihan	Pengukuran BKD dan LKD Untuk PTS Wilayah Riau, Jambi dan Kepri Kopertis Wilayah X	Pekan Baru, 2-3 Juli 2013
18	Workshop	Penulisan RKPP, RP Dan Buku Ajar	Pekan Baru, 17 Juli 2013
19	Pelatihan	Penulisan Proposal Penelitian Bantuan stimulus Dikti	UPP, 18 Oktober 2013

20	Seminar Hasil Penelitian	Strategi Pemasaran Yang Mendorong keberhasilanUsaha Baru (Studi Kasus Pada Usaha-usaha Di sekitar Kampus UPP)	UPP, 25 September 2013
21	Proceeding International Conference	Aspek Geografi dan Infrastruktur di Propinsi Riau	ISBN : 978-602-50627-0-4 2018
22	Jurnal Organisasi Dan Manajemen. Universitas Terbuka	Dimensions of Poverty in Coastal Areas In Indragiri Hulu Regency Riau Province	ISSN : 2442 - 9155 Vol.14 N0.1 2018
22	ISBEST	Determinants of Poverty on Indonesia: Dynamic Panel Data Analysis at the Village Level	23-24 Oktober 2019

F. Karya dalam Buku

No.	Judul Buku	Tahun	ISBN	Penerbit
1	Pengantar Ekonomi Mikro	2009	9789797921019	UNRI Press
2	Pengantar Ekonomi Makro	2013	979-503-404-9	UNRI Press
3	Statistik 1			
4	Ekonomi Pembangunan	2015		UPP Press

G. Pengalaman Mengajar 4 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah	Tahun	Tempat
1	Dosen tidak tetap Pengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	2017 sampai sekarang	Universitas Islam Yogyakarta
2	Dosen tidak tetap Pengajar Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	2017 sampai sekarang	Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
3	Dosen tidak tetap Universitas Muhammadiyah Surakarta	2019 sampai sekarang	Universitas Muhammadiyah Surakarta
4	Dosen tidak tetap Universitas Sanata Darma Yogyakarta	2017 sampai sekarang	Universitas Sanata Darma

5	Dosen tidak tetap Atmajaya Yogyakarta	2019 sampai sekarang	Universitas Atmajaya Yogyakarta
6	Tuton Universitas Terbuka	2016 sampai sekarang	Universitas Terbuka